

SKRIPSI

**PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)
DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI
PROVINSI ACEH**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD RIJALUL GHIYATS
NIM: 210604050**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/ 1447**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Rijalul Ghiyats

NIM : 210604050

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan isi saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Februari 2026

Yang Menyatakan



Muhammad Rijalul Ghiyats

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh

Disusun Oleh:

Muhammad Rijalul Ghiyats

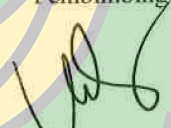
NIM: 210604050

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

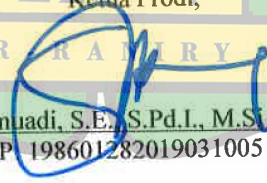
Pembimbing I


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.A
NIP. 195612311987031031

Pembimbing II


Uliya Azra, S.E., M.Si
NIP. 199410022022032001

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP. 198601282019031005

Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Sekretaris

Penguji II

Fayeno Yunanda, S.E., M.Si
NIP. 1105015603960001

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Rijalul Ghiyats
NIM : 210604050
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
E-mail : 210604050@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

**Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Rata-Rata Lama Sekolah
Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 Februari 2026

Mengetahui

Penulis

M. Rijalul Ghiyats
NIM. 210604050

Pembimbing I

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.A
NIP. 195612311987031031

Pembimbing II

Uliya Azra, S.E., M.Si
NIP. 199410022022032001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Uliya Azra, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.A selaku Dosen Pembimbing I serta Penasehat Akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ilmu Ekonomi. Uliya Azra, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan serta arahan dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Marwiyati, S.E., M.M selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ilmu Ekonomi.
6. Seluruh Dosen dan Staf Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta penulis yakni Almarhum Ayahanda Drs. Wiryadi dan Ibunda Meutia S.Pd. Terima kasih untuk setiap tetes keringat, langkah pengorbanan serta kerja keras yang telah dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, memberikan kasih sayang yang tulus, dan mendoakan

penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah dalam meraih mimpi di masa depan.

8. Terima kasih kepada saudari-saudari tersayang penulis yakni Sirry Hijirni, Tisya Humaira dan seluruh keluarga penulis yang turut memberikan doa, dukungan, dan motivasi.
9. Terima kasih kepada teman seperjuangan penulis yakni Ikhsan Maulana, M. Irham, Rajul Hakim, Abdul Hakim serta teman-teman jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2021 semuanya yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Terima kasih kepada seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, inspirasi, doa, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 2 Februari 2026

Penulis,

Muhammad Rijalul Ghiyats

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*
 هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta marbutah (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

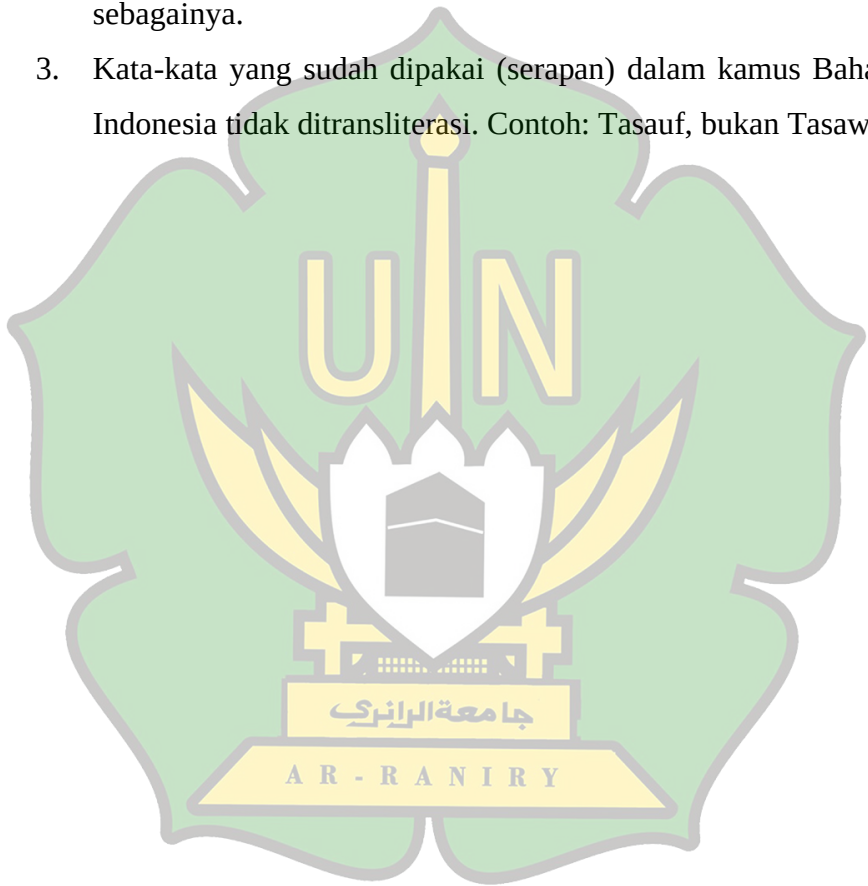
Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Muhammad Rijalul Ghiyats
NIM : 210604050
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
Judul : Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh
Pembimbing I : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
Pembimbing II : Uliya Azra, S.E., M.Si

Provinsi Aceh masih menghadapi persoalan ketenagakerjaan yang ditandai dengan tingkat pengangguran terbuka yang relatif fluktuatif, seiring dengan dinamika kebijakan upah dan kualitas pendidikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari 23 kabupaten/kota selama periode 2020–2024. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, yang mengindikasikan bahwa peningkatan upah minimum mampu mendorong penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Secara simultan, upah minimum provinsi dan rata-rata lama sekolah terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan memiliki peran penting dalam menekan pengangguran, sedangkan peningkatan pendidikan formal belum sepenuhnya diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja di Aceh.

Kata Kunci : *Upah Minimum Provinsi, Rata-Rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Aceh*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat penelitian.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	18
2.1.1 Pengangguran.....	18
2.1.2 Teori Pengangguran.....	23
2.1.3 Indikator yang mempengaruhi Pengangguran.....	25
2.2 Upah Minimum Provinsi.....	27
2.2.1 Teori upah minimum.....	28
2.2.2 Indikator Penetapan Upah Minimum.....	32
2.3 Rata-rata Lama Sekolah.....	34
2.3.1 Teori Rata-Rata Lama Sekolah.....	36
2.3.2 Indikator Rata-Rata Lama Sekolah.....	37
2.4 Hubungan Antar Variabel.....	38
2.4.1 Hubungan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	39
2.4.2 Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	40
2.5 Penelitian Terkait.....	42
2.6 Kerangka Berpikir.....	47

2.7 Hipotesis Penelitian	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	50
3.1 Desain Penelitian	50
3.2 Jenis dan Sumber Data	50
3.3 Sampel Penelitian	51
3.4 Variabel Penelitian	51
3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	51
3.6 Metode Analisis Data	52
3.7 Teknik Analisis Data	54
3.8 Pengujian Data Panel.....	57
3.9 Pengujian Hipotesis Data Panel	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian.....	61
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	62
4.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	64
4.2.2 Upah Minimum Provinsi.....	65
4.2.3 Rata-Rata Lama Sekolah.....	67
4.3 Analisis Penentuan Model Regresi Data Panel	69
4.3.1 Uji Chow (<i>Chow-test</i>).....	69
4.3.2 Uji Hausman (<i>Hausman-test</i>).....	70
4.4 Model Regresi Data Panel	71
4.5 Pengujian Hipotesis Penelitian	73
4.5.1 Uji Parsial (Uji-t)	73
4.5.2 Uji Simultan (Uji-f)	74
4.5.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	75
4.6 Pembahasan dan Hasil Penelitian	76
4.6.1 Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	76
4.6.2 Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	78
4.6.3 Pengaruh Upah Minimum Provinsi dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	80
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR LAMPIRAN	90

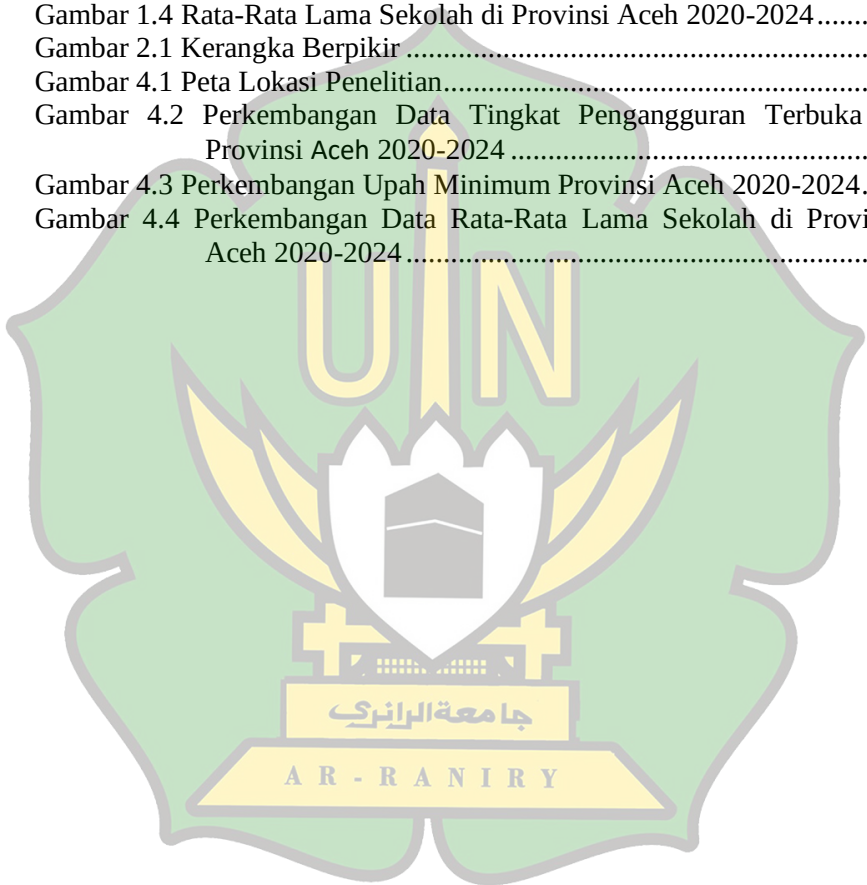
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait	44
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	52
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	63
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow.....	70
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman	71
Tabel 4.4 Hasil Estimasi Data Panel Metode <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia 2020-2024 (Persen)	4
Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh 2020-2024...	6
Gambar 1.3 Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2020-2024.....	9
Gambar 1.4 Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Aceh 2020-2024.....	12
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	48
Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian.....	61
Gambar 4.2 Perkembangan Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh 2020-2024	64
Gambar 4.3 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Aceh 2020-2024.	66
Gambar 4.4 Perkembangan Data Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Aceh 2020-2024	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Upah Minimum Provinsi (UMP), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh.....	90
Lampiran 2. Analisis Statistik Deskriptif	96
Lampiran 3. Uji Chow.....	96
Lampiran 4. Uji Hausman	97
Lampiran 5. Estimasi Data Panel Metode <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)....	97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran terbuka di era globalisasi saat ini merupakan masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam perekonomian dunia, termasuk peningkatan persaingan, perubahan struktur ekonomi, dan otomatisasi pekerjaan. Pengangguran menjadi salah satu masalah yang dimiliki oleh hampir setiap negara, terutama pada negara-negara sedang berkembang. Namun di negara yang sudah maju pengangguran hanyalah masalah siklus ekonomi. Masalah pengangguran tidak hanya menjadi masalah ekonomi semata, tetapi juga menjadi permasalahan yang dapat mencakup beberapa segi kehidupan karena pengangguran mampu memengaruhi kualitas hidup seseorang yang secara umum dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Pengangguran merupakan sekelompok orang yang sudah tergolong kedalam angkatan kerja dan berusaha mendapatkan pekerjaan hanya saja belum mendapatkannya. Pengangguran bisa membawa dampak yang buruk untuk suatu negara yaitu apabila semakin tinggi tingkat penganggurannya maka tingkat kemiskinan akan naik dan menimbulkan ketimpangan sosial, hal ini menjadi dampak buruk dikarenakan pengangguran mengakibatkan sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi keperluan hidupnya disebabkan tidak memiliki pendapatan dan pekerjaan (Sukirno, 2018).

Pengangguran merupakan kondisi yang dijumpai di hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. (Nanga, 2001) mendefinisikan pengangguran sebagai situasi ketika individu yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang berupaya secara aktif untuk memperoleh pekerjaan. Kelompok penganggur mencakup penduduk yang tengah mencari pekerjaan, sedang merintis atau menyiapkan usaha, merasa kecil kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan, serta mereka yang telah mendapatkan pekerjaan namun belum mulai menjalankan aktivitas kerja (Badan Pusat Statistik, 2016). Dalam konteks Indonesia, pengangguran terbuka dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya keterampilan tenaga kerja, persaingan global yang ketat, dan perubahan struktur ekonomi yang tidak seimbang. Banyak perusahaan di Indonesia yang kesulitan bersaing dengan perusahaan asing yang memiliki teknologi dan sumber daya yang lebih maju. Selain itu, otomatisasi pekerjaan juga menjadi salah satu penyebab pengangguran terbuka. Dengan kemajuan teknologi, banyak pekerjaan yang dapat dilakukan oleh mesin atau komputer, sehingga mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Dampak pengangguran terbuka sangat besar, tidak hanya bagi individu yang menganggur, tetapi juga bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Pengangguran terbuka dapat menyebabkan penurunan pendapatan, peningkatan kemiskinan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Mengatasi pengangguran terbuka, perlu dilakukan beberapa upaya, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan

pelatihan, penguatan perlindungan tenaga kerja, dan pengembangan kebijakan adaptif. Pemerintah dan stakeholder lainnya perlu bekerja sama untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas (Simanjuntak et al., 2025).

Pengangguran terbuka yang juga sering disebut sebagai pengangguran terselubung, mengacu pada kondisi individu yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, tengah mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari dalam satu minggu, atau masih berupaya memperoleh pekerjaan yang dinilai layak. Fenomena ini pada umumnya muncul akibat ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja atau pencari kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menampung mereka. Keberadaan pengangguran terbuka kerap menjadi persoalan serius dalam perekonomian karena berdampak pada penurunan tingkat produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang selanjutnya berpotensi meningkatkan kemiskinan serta memunculkan berbagai permasalahan sosial. Hingga saat ini, pengangguran terbuka masih menjadi isu struktural yang sulit dihindari oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Indonesia, persoalan ini terus menjadi perhatian sejak berakhirnya era Orde Baru, seiring dengan dinamika perekonomian nasional yang dinilai belum sepenuhnya stabil. Salah satu sasaran utama pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga sebagai negara berkembang, Indonesia perlu melakukan berbagai penyesuaian dan

pembenahan guna mendukung pembangunan tersebut. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan stabilitas nasional, memperbaiki iklim investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, dan investasi (Rambe et al., 2019). Berikut grafik tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode tahun 2017-2024:

Gambar 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia 2017-2024
(Persen)



Sumber: BPS (2024)

Berdasarkan Gambar 1.1 yang menampilkan grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia, terlihat bahwa pada tahun 2020 angka pengangguran mencapai level tertinggi selama periode pengamatan, yakni sebesar 7,07%. Tingginya angka tersebut disebabkan oleh dampak langsung pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak sektor usaha tutup atau mengurangi karyawan

karena pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi. Peningkatan kembali aktivitas sektor informal dan UMKM. Tahun 2024 menunjukkan tren positif, dengan TPT menurun menjadi 4,91% dikarenakan investasi mulai tumbuh kembali, termasuk di sektor manufaktur dan digital, kebijakan peningkatan keterampilan tenaga kerja, membaiknya pasar kerja dan penciptaan lapangan kerja baru melalui proyek infrastruktur dan transformasi digital (Badan Pusat Statistik, 2024c).

Provinsi Aceh yang berada di wilayah paling barat Indonesia merupakan salah satu daerah yang masih dihadapkan pada persoalan pengangguran. Walaupun Aceh telah memperoleh Dana Otonomi Khusus sejak tahun 2008 yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Tingkat pengangguran di provinsi tersebut tergolong cenderung lebih tinggi apabila dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh masih menjadi isu penting, khususnya pada kelompok angkatan kerja usia muda dan lulusan pendidikan tinggi (Badan Pusat Statistik, 2024b).

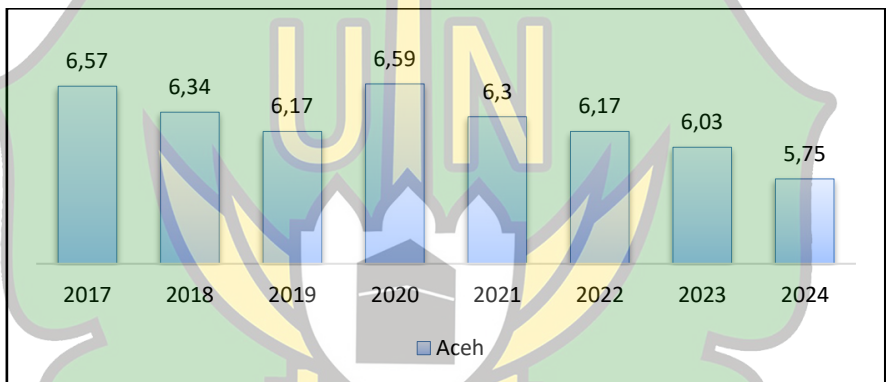
Faktor penyebab tingginya TPT di Aceh sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, antara lain rendahnya daya serap tenaga kerja pada sektor formal, terbatasnya peluang kerja di industri-industri strategis, serta adanya ketidakseimbangan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dan tuntutan pasar kerja. Selain itu, konflik berkepanjangan yang dialami oleh Aceh sebelum

adanya perjanjian damai pada tahun 2005 juga turut memberikan dampak jangka panjang terhadap struktur ekonomi dan dinamika pasar kerja di provinsi ini (Ramadhiani et al., 2024).

Berikut disajikan tabel data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh selama periode 2017–2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh:

Gambar 1.2

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh 2017-2024



Sumber: BPS (2024)

Grafik tersebut memperlihatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh periode 2017–2024 mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi dan pasar kerja, di mana penurunan TPT pada 2017–2019 mencerminkan stabilnya aktivitas ekonomi serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor informal, sementara kenaikan pada tahun 2020 menjadi 6,59% disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memicu perlambatan usaha, pemutusan hubungan kerja, dan berkurangnya kesempatan kerja. selanjutnya, penurunan TPT secara

bertahap pada 2021–2024 menunjukkan fase pemulihan ekonomi daerah yang didukung oleh pelonggaran pembatasan aktivitas, program pemulihan ekonomi pemerintah, meningkatnya aktivitas sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan konstruksi, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia, sehingga jumlah penduduk bekerja meningkat lebih cepat dibanding pertumbuhan angkatan kerja (Badan Pusat Statistik, 2024b).

Silvie dan Hasmarini (2023) mengemukakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama, antara lain Upah Minimum Provinsi (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan adalah melakukan pembenahan sistem pengupahan melalui penetapan kebijakan upah minimum. Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pekerja secara per kapita sekaligus mendorong kenaikan rata-rata tingkat upah tenaga kerja (Putri & Soelistyo, 2018).

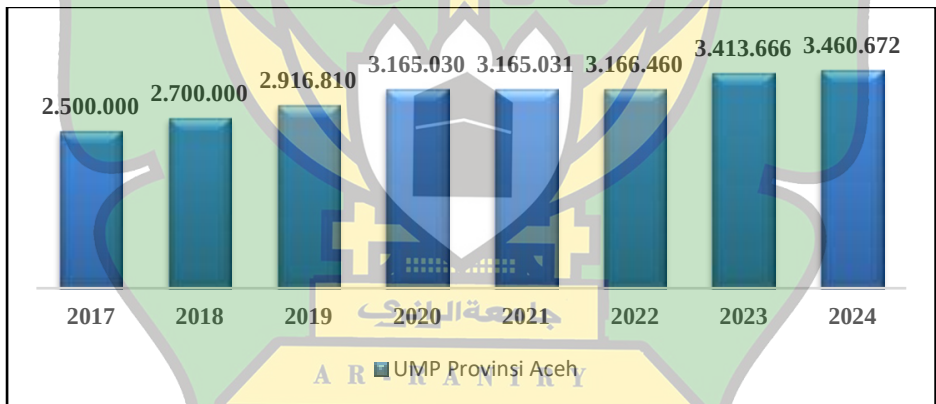
Upah minimum menjadi salah satu variabel krusial yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka, sekaligus berperan sebagai indikator penting dalam menilai kondisi perekonomian suatu negara. Penetapan upah minimum oleh pemerintah berfungsi sebagai batas bawah upah bagi pekerja di sektor formal, dengan tujuan melindungi kesejahteraan tenaga kerja serta menjamin bahwa pekerja memperoleh pendapatan yang layak sesuai dengan

kebutuhan hidupnya. Namun, Kebijakan ini memiliki berbagai macam dampak tergantung kondisi ekonomi setempat dan bagaimana penerapan kebijakan tersebut (Erlangga et al., 2024).

Penetapan upah minimum yang terlalu tinggi, apabila tidak sebanding dengan tingkat produktivitas tenaga kerja serta kapasitas finansial perusahaan, berpotensi menimbulkan tekanan dan permasalahan pada kondisi keuangan perusahaan, terutama pada usaha kecil dan menengah yang memiliki margin keuntungan terbatas. Pada saat seperti ini biasanya perusahaan akan menunda merekrut karyawan bahkan mengurangi jumlah pekerja untuk menyesuaikan anggaran mereka. Selain itu, perusahaan juga mungkin memilih untuk mengotomatisasi pekerjaan atau mengalihkan operasinya ke daerah dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, yang pada akhirnya berpotensi mendorong peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Penetapan upah minimum yang rendah juga dapat menyebabkan penurunan daya beli tenaga kerja, yang dimana akan berdampak negatif pada konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, upah yang terlalu rendah juga akan menurunkan kualitas angkatan kerja dalam negeri dan memperburuk ketimpangan pendapatan karena pekerja lebih memilih berpindah ke sektor informal atau mencari pekerjaan di luar negeri. Oleh karena itu, dalam menetapkan kebijakan upah minimum harus mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja, kondisi pasar tenaga kerja, dan daya saing perusahaan (Hidayah et al., 2016).

Penetapan upah memiliki dampak positif jika dilihat dari sisi penawaran tenaga kerja, karena upah yang lebih tinggi mendorong lebih banyak individu untuk bersedia bekerja, sehingga berpotensi mengurangi pengangguran. Namun, dari perspektif permintaan tenaga kerja, kebijakan ini dapat memiliki dampak negatif, karena upah tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dapat memberatkan perusahaan dan mengakibatkan berkurangnya jumlah pekerja yang diserap di suatu wilayah (Sahara & Iryani, 2023).

Gambar 1.3
Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2017-2024



Sumber: Disnakermobduk Aceh (2024)

Perubahan upah minimum di Provinsi Aceh selama periode 2017–2024 dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kondisi ekonomi makro, arah kebijakan pemerintah pusat, dan interaksi kepentingan antara pekerja dan pelaku usaha. Tidak adanya kenaikan pada periode 2020–2021 mencerminkan tekanan ekonomi

akibat pandemi, sementara kenaikan bertahap pada periode berikutnya menunjukkan pemulihan ekonomi dan penyesuaian terhadap standar hidup yang layak. UMP ditentukan berdasarkan indikator inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha di wilayah tersebut (Disnakermobduk Aceh, 2024).

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator kunci dalam menilai mutu pendidikan di suatu daerah dan memiliki keterkaitan langsung dengan tingkat pengangguran terbuka. Pendidikan adalah upaya yang dirancang secara sadar dan sistematis untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk mengembangkan potensi penuh mereka. Melalui pendidikan, individu dilengkapi dengan nilai-nilai spiritual, pengendalian diri, pengembangan kepribadian, kemampuan intelektual, dan keterampilan yang berguna untuk kehidupan pribadi dan kontribusi sosial. Dalam konteks sumber daya manusia, pendidikan berfungsi sebagai landasan strategis yang mendukung peningkatan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pendidikan berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dalam negeri karena merupakan alat untuk mengembangkan kompetensi dan keahlian masyarakat. Penguasaan keterampilan ini memungkinkan peningkatan baik kuantitas maupun kualitas produksi, sehingga berdampak positif pada kondisi ekonomi. Semakin lama rata-rata lama pendidikan, semakin besar kemungkinan individu memiliki

pengetahuan dan keterampilan yang memadai, yang pada gilirannya meningkatkan peluang mereka untuk terserap ke pasar tenaga kerja. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang rendah cenderung menyebabkan keterbatasan keterampilan tenaga kerja, yang berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran terbuka (Johar et al., 2023).

Provinsi Aceh yang dihadapkan pada berbagai dinamika sosial, budaya, dan ekonomi masih menunjukkan capaian rata-rata lama sekolah yang relatif belum memenuhi target pendidikan nasional. Kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah ini. Namun, fakta empiris di Aceh memperlihatkan adanya fenomena yang berbeda, dimana peningkatan rata-rata lama sekolah tidak selalu secara langsung diiringi oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka. Keadaan ini mengindikasikan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai sejauh mana kontribusi rata-rata lama sekolah terhadap pengangguran terbuka, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterkaitan antara pendidikan dan daya serap tenaga kerja. Pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena tersebut menjadi sangat penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk menekan tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan mutu pendidikan, sehingga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Aceh secara berkelanjutan (Badan Pusat Statistik, 2024a).

Gambar 1.4

Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Aceh 2017-2024



Sumber: BPS (2024)

Grafik yang menggambarkan tren peningkatan rata-rata lama sekolah di Provinsi Aceh periode 2017–2024 yang cenderung meningkat menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam akses dan partisipasi pendidikan, yang didorong oleh perluasan fasilitas sekolah, program wajib belajar, bantuan pendidikan seperti BOS dan beasiswa, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan formal. Kenaikan yang tetap terjadi pada masa pandemi 2020–2021 mencerminkan keberlanjutan proses belajar melalui sistem daring serta kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan, sementara peningkatan yang lebih nyata pada 2022–2024 berkaitan dengan kembalinya pembelajaran tatap muka, menurunnya angka putus sekolah, serta membaiknya kondisi ekonomi rumah tangga, sehingga semakin banyak penduduk yang mampu melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi dan secara kumulatif menaikkan rata-rata lama sekolah di Aceh (Badan Pusat Statistik, 2024a).

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan temuan dan kesimpulan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Prawira (2018) melaporkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Asraf et al., (2023) menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, yang menandakan bahwa setiap perubahan UMP, baik kenaikan maupun penurunan, memberikan dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Selanjutnya Mustakim et al., (2022) menemukan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Afifah et al., (2023), yang menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan uraian serta konteks latar belakang yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan rata-rata lama sekolah secara simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan rata-rata lama sekolah secara bersamaan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan serta menjadi sumber referensi bagi peneliti maupun pembaca dalam menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan rata-rata lama pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat guna mengatasi permasalahan pengangguran di wilayah tersebut.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini mampu memberikan informasi tambahan serta perspektif yang lebih mendalam tentang pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan rata-rata durasi pendidikan terhadap tingkat pengangguran yang terlihat di Provinsi Aceh.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang dan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, serta susunan dan alur pembahasan yang diterapkan dalam penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan pembahasan mengenai tinjauan pustaka atau landasan teori yang relevan dengan penelitian, definisi dan batasan variabel yang digunakan, kajian penelitian sebelumnya yang berhubungan, kerangka konseptual, serta perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang diterapkan, mencakup desain penelitian, jenis dan sumber data, teknik pemilihan sampel, variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, metode dan prosedur analisis data, serta tahapan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan deskripsi objek penelitian, hasil-hasil analisis data yang diperoleh, serta pembahasan terhadap temuan yang berkaitan dengan objek penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini menyajikan rangkuman menyeluruh dari temuan penelitian yang diperoleh melalui proses analisis dan interpretasi data, sekaligus memberikan saran atau

rekomendasi yang diarahkan sebagai langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak terkait.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

2.1.1 Pengangguran

Berdasarkan keterangan dari Badan Pusat Statistik (2024c), pengangguran adalah kondisi individu yang tidak sedang bekerja tetapi tengah berupaya mencari pekerjaan atau mempersiapkan diri untuk memulai suatu kegiatan usaha.

Pengangguran menggambarkan kondisi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan atau berada dalam proses aktif mencari pekerjaan. Di sisi lain, individu yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak melakukan upaya untuk mencarinya tidak dikategorikan sebagai pengangguran (Sukirno, 2018). Adapun kelompok yang termasuk dalam angkatan kerja adalah sebagai berikut:

- a. *Employed*, yaitu individu yang memiliki pekerjaan dan secara aktif melakukan aktivitas kerja dalam berbagai bentuk guna memperoleh pendapatan.
- b. *Unemployed*, yaitu individu yang tidak memiliki atau belum mendapatkan pekerjaan sehingga belum memperoleh pendapatan, namun secara aktif melakukan upaya pencarian kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan keadaan ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan atau sedang melakukan upaya pencarian kerja, namun belum berhasil memperoleh pekerjaan. Fenomena ini umumnya

dipicu oleh ketidakcocokan antara keterampilan pencari kerja dan kualifikasi yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja, serta ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan pekerjaan. Akibatnya, peluang kerja yang tersedia hanya dapat menyerap sebagian dari tenaga kerja, sementara pencari kerja lainnya harus terus mencari peluang di sektor atau tempat kerja yang berbeda.

Menurut Sukirno (2018), pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis sebagai berikut:

1. Pengangguran Normal atau Friksional

Sebuah perekonomian dikatakan telah mencapai tingkat pengangguran penuh ketika tingkat pengangguran berada antara dua dan tiga persen. Tingkat pengangguran ini dikelompokkan sebagai pengangguran normal atau friksional. Seseorang dalam kategori ini tidak sepenuhnya menganggur, tetapi sedang dalam proses mencari pekerjaan yang dianggap sesuai, layak, dan mampu memberikan keamanan di masa depan. Dalam perekonomian yang tumbuh pesat, tingkat pengangguran sering dianggap relatif rendah karena peluang kerja tersedia secara luas. Namun, di sisi lain, perusahaan sering kesulitan menemukan pekerja yang memenuhi kebutuhan mereka. Ketika perusahaan menawarkan upah yang lebih tinggi, hal ini dapat mendorong pekerja untuk meninggalkan pekerjaan sebelumnya dan

beralih ke pekerjaan baru yang menawarkan imbalan yang lebih menarik.

2. Pengangguran siklikal

Kenaikan permintaan agregat mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan volume produksi. Dengan tersedianya lebih banyak lapangan kerja, tingkat pengangguran cenderung menurun. Namun, di sisi lain, peningkatan tenaga kerja ini dapat menyebabkan penurunan permintaan agregat akibat menurunnya harga komoditas. Penurunan permintaan agregat ini dapat menyebabkan perusahaan mengurangi tenaga kerja mereka, yang pada akibatnya akan meningkatkan tingkat pengangguran kembali. Jenis pengangguran ini disebut pengangguran siklikal.

3. Pengangguran struktural

Jenis pengangguran ini muncul sebagai akibat dari berkurangnya beberapa faktor produksi, seperti hadirnya barang substitusi yang lebih efisien, kemajuan teknologi yang menurunkan kebutuhan terhadap produk tertentu, peningkatan biaya produksi secara signifikan, serta menurunnya daya saing. Hal ini berdampak pada penurunan kinerja ekspor industri karena persaingan dengan negara lain. Kondisi-kondisi ini menyebabkan penurunan aktivitas produksi di industri terkait, memaksa perusahaan untuk mengurangi tenaga kerjanya. Pekerja yang terdampak akhirnya kehilangan pekerjaan mereka dan masuk ke dalam

kategori pengangguran. Bentuk pengangguran ini dikenal sebagai pengangguran struktural.

4. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi muncul sebagai akibat dari peralihan penggunaan tenaga kerja manusia ke mesin serta bahan kimia dalam proses produksi. Kondisi ini umumnya dipicu oleh kemajuan teknologi, di mana mesin dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi menggantikan peran tenaga kerja manusia. Selain itu, penggunaan bahan kimia, seperti herbisida untuk memberantas gulma dan rumput liar, juga mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja dalam kegiatan pengelolaan sawah dan lahan pertanian. Bentuk pengangguran yang timbul akibat perkembangan ini dikenal sebagai pengangguran teknologi.

Hasyim (2016) menyatakan bahwa berdasarkan karakteristiknya, pengangguran dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini terjadi karena pertumbuhan lapangan kerja lebih rendah daripada peningkatan angkatan kerja. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya jumlah individu yang tidak mendapatkan pekerjaan di perekonomian. Akibatnya, pencari kerja tidak terserap dan tetap menganggur secara terus-menerus. Fenomena ini dikenal sebagai pengangguran terbuka. Pengangguran

terbuka juga dapat dipicu oleh perkembangan teknologi yang cepat yang menyebabkan banyak aktivitas kerja beralih ke mesin, serta oleh perlambatan pertumbuhan di sektor industri.

2. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi umumnya banyak dijumpai pada sektor pertanian maupun sektor jasa. Di negara-negara yang masih berkembang, kegiatan ekonomi seringkali melibatkan jumlah pekerja yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efisiensi produksi yang ideal. Sebagian besar tenaga kerja yang berlebih ini tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan hasil, sehingga dianggap sebagai pengangguran yang tidak terlihat dalam konteks ekonomi.

3. Pengangguran Bermusim

Jenis pengangguran ini umumnya terjadi di sektor pertanian dan perikanan. Faktor utamanya berasal dari kondisi alam, seperti curah hujan yang tinggi, banjir, kekeringan, atau fenomena alam lain yang mengganggu kegiatan pertanian, sehingga para petani tidak dapat melaksanakan pekerjaan mereka. Nelayan juga mengalami situasi serupa, di mana cuaca ekstrem seperti badai, gelombang tinggi, atau musim hujan mencegah mereka untuk berlayar ke laut. Akibatnya, para petani dan

nelayan ini terpaksa sementara waktu tidak bekerja dan menjadi pengangguran.

4. Setengah Menganggur

Di negara-negara yang sedang berkembang, pergerakan warga dari wilayah pedesaan menuju perkotaan terjadi dengan sangat cepat. Keadaan ini mengakibatkan banyak migran di kota-kota tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang pantas, sehingga mereka menjadi benar-benar tanpa pekerjaan. Selain itu, terdapat pula individu yang tidak sepenuhnya menganggur, namun jumlah jam kerjanya lebih rendah daripada standar yang berlaku. Kelompok tenaga kerja tersebut dikenal sebagai pekerja setengah menganggur.

$$TPT = \frac{\text{keseluruhan angkatan kerja}}{\text{angkatan kerja}} \times 100 \quad (2.1)$$

2.1.2 Teori Pengangguran

Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena pengangguran di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1) Teori Klasik

Teori klasik menafsirkan pengangguran sebagai kondisi yang pada dasarnya dapat dikurangi melalui mekanisme penawaran dan penetapan harga di pasar bebas, yang dipercaya mampu menyeimbangkan permintaan dan penawaran tenaga kerja sehingga seluruh tenaga kerja

terserap. Dalam perspektif ini, pengangguran dianggap timbul akibat alokasi sumber daya yang bersifat sementara tidak efisien dan diyakini akan kembali terkoreksi seiring berlangsungnya penyesuaian pasar (Gilarso, 2004).

2) Teori Keynes

Teori Keynesian berbeda dari teori klasik karena menganggap bahwa pengangguran sebagian besar muncul akibat rendahnya permintaan total. Dari sudut pandang ini, perlambatan ekonomi tidak disebabkan oleh batasan kapasitas produksi, tetapi lebih karena lemahnya konsumsi masyarakat. Keynes menegaskan bahwa permasalahan pengangguran tidak dapat sepenuhnya diatasi oleh mekanisme pasar bebas. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang disertai penurunan upah dapat menimbulkan dampak negatif, karena hal tersebut mencerminkan berkurangnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Situasi ini dapat berakibat pada penurunan keuntungan bagi produsen, sehingga mereka tidak dapat mempekerjakan jumlah tenaga kerja yang lebih. Selain itu, dalam kenyataannya, tingkat upah cenderung sulit untuk turun, sehingga penyesuaian upah menjadi tantangan. Oleh karena itu, pandangan Keynes menunjukkan bahwa hanya mengandalkan mekanisme pasar tidaklah cukup efektif untuk menyelesaikan masalah pengangguran.

3) Teori Kependudukan dari Malthus

Teori Malthus, sebagaimana dijelaskan dalam buku “Ekonomi Sumber Daya” (Mulyadi, 2014:5), menyatakan bahwa pertumbuhan populasi cenderung jauh lebih cepat dibandingkan peningkatan produksi pangan. Malthus berargumen bahwa jumlah penduduk bertambah secara deret ukur (*geometric progression*), contohnya 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya, sementara produksi pangan hanya meningkat secara deret hitung (*arithmetic progression*), misalnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kemampuan penyediaan pangan ini menyebabkan Malthus menyimpulkan bahwa pada suatu titik akan muncul krisis serius yang berpotensi mengancam kelangsungan hidup manusia.

2.1.3 Indikator yang mempengaruhi Pengangguran

Kaufman dan Hotchkis, sebagaimana dikutip dalam Pujoalwanto (2014), mengemukakan sejumlah faktor yang memengaruhi terjadinya pengangguran, antara lain sebagai berikut:

1) Proses mencari kerja

Masuknya tenaga kerja baru ke pasar kerja cenderung meningkatkan tingkat persaingan dalam memperoleh pekerjaan. Dalam proses pencarian kerja tersebut, terdapat berbagai kendala, antara lain keinginan pekerja untuk berpindah ke pekerjaan yang dinilai lebih sesuai, serta adanya keterbatasan dan ketidaksempurnaan informasi

terkait tingkat upah yang wajar dan kondisi kerja yang tersedia.

2) Kekakuan upah

Tingkat upah yang kaku dapat memicu pengangguran. Ketika produksi menurun, permintaan tenaga kerja juga menurun, yang seharusnya diikuti oleh penyesuaian tingkat upah. Namun, jika upah bersifat kaku, penyesuaian ini tidak dapat terjadi secara optimal. Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat menyebabkan tingkat upah tetap relatif stabil atau bahkan meningkat, sehingga mendorong peningkatan pasokan tenaga kerja. Akibatnya, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan tenaga kerja menjadi lebih besar dan memicu munculnya inflasi pengangguran yang disebabkan oleh kekakuan upah.

3) Efisiensi upah

Efisiensi dalam penentuan gaji muncul karena semakin besar gaji yang diberikan oleh perusahaan, semakin kuat pula dorongan bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Sebagai hasilnya, ketika perusahaan memutuskan untuk memberikan gaji yang lebih tinggi kepada karyawan yang memiliki efisiensi yang lebih baik, persaingan untuk posisi tersebut menjadi lebih ketat. Hal ini dapat membuat beberapa pencari kerja terjebak di luar angkatan kerja, yang pada gilirannya mengakibatkan

pengangguran sebagai hasil dari pemilihan tenaga kerja yang berfokus pada efisiensi.

2.2 Upah Minimum Provinsi

Upah dapat diartikan sebagai imbalan finansial yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan sebagai bentuk kompensasi atas tenaga, waktu, dan jasa yang telah dicurahkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Besaran upah ditentukan melalui kesepakatan atau ketentuan yang ada dalam peraturan hukum, dan dibayarkan sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat antara perusahaan dan karyawan. Di sisi lain, upah minimum yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 adalah jumlah upah terendah yang ditentukan secara regional, baik itu di tingkat wilayah, sektor, maupun sub-sektor. Dalam regulasi ini, upah minimum mencakup upah pokok atau upah pokok ditambah tunjangan (Sumarsono, 2018).

Gaji bersih atau upah merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan atau pekerja setiap bulan, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang disalurkan oleh perusahaan, organisasi, atau pemberi kerja. Jika diberikan dalam bentuk barang, nilainya disesuaikan dengan harga pasar setempat. Gaji bersih mencerminkan pendapatan yang diterima setelah dikurangi berbagai potongan, seperti kontribusi wajib, pajak penghasilan, dan potongan lainnya (Disnakermobduk Aceh, 2024). Sementara itu, upah didefinisikan sebagai imbalan berupa uang yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja atas jasa yang telah dilakukan, berdasarkan

kesepakatan bersama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran upah ini mencakup gaji pokok maupun tunjangan yang diperuntukkan bagi pekerja beserta keluarganya.

Dalam menetapkan tingkatan upah, perusahaan dan karyawan menanggapi situasi yang ada di pasar kerja. Pada saat produksi dan kesempatan kerja melimpah, upah biasanya meningkat dengan cepat. Sebaliknya, saat produksi dan kesempatan kerja menurun, peningkatan upah menjadi lebih lambat dan bahkan bisa saja menurun (Dornbusch & Fischer, 2001).

Upah merupakan sejumlah pembayaran dalam bentuk uang yang diterima pekerja dari perusahaan sebagai balasan atas kontribusi kerja yang telah dilakukan, sebagaimana diatur dan disepakati dalam hubungan kerja. Tingkat upah minimum yang diterapkan di suatu wilayah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan resmi yang mempertimbangkan kondisi setempat dan peraturan yang berlaku. Secara konsep, penentuan upah minimum dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PED) (Sumarsono, 2018).

2.2.1 Teori upah minimum

1) Teori Malhtus

Salah satu pemikir dari aliran klasik menelaah gaji dengan menghubungkannya pada dinamika jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk dianggap sebagai elemen penting untuk menjelaskan berbagai kejadian ekonomi. Dalam

kerangka ini, gaji terbentuk melalui interaksi antara penawaran dan permintaan kerja. Pandangan klasik ini berfokus pada pendekatan sisi penawaran, yang baru-baru ini kembali menjadi sorotan. Tingkat upah, sebagai nilai atau harga penggunaan tenaga kerja, sangat dipengaruhi oleh jumlah pasokan tenaga kerja. Pasokan ini terutama bersumber dari populasi yang berada pada usia produktif, yang menjadi bagian dari keseluruhan populasi.

Ketika populasi meningkat maka pasokan tenaga kerja juga meningkat, yang menimbulkan tekanan penurunan pada tingkat upah. Sebaliknya, jika populasi menurun, pasokan tenaga kerja juga akan berkurang, yang cenderung mendorong kenaikan tingkat upah. Oleh karena itu, dari sudut pandang lain, upaya untuk menaikkan upah tidak dianggap menguntungkan dalam jangka panjang. Ketika tingkat upah meningkat, kesejahteraan masyarakat diharapkan membaik, yang mendorong kecenderungan untuk memiliki keluarga yang lebih besar. Sebaliknya, ketika upah menurun, tingkat kesejahteraan akan menurun dan kapasitas ekonomi masyarakat akan melemah, yang pada akhirnya mendorong gaya hidup yang lebih hemat dan pilihan untuk memiliki lebih sedikit anak. Penurunan pertumbuhan populasi ini kemudian akan mengurangi pasokan tenaga kerja dan mendorong upah kembali ke tingkat semula. Dengan demikian, dalam jangka panjang tingkat upah cenderung mengalami perubahan

mengikuti dinamika jumlah penduduk dan pada akhirnya akan bergerak kembali menuju kondisi keseimbangan.

2) Teori Jhon Stuart Mills

Mills termasuk salah satu ekonom aliran klasik yang berpendapat bahwa pada akhirnya tingkat upah tidak akan mengalami perubahan yang berarti dari posisi awalnya, meskipun landasan argumennya berbeda. Ia menjelaskan bahwa dalam perekonomian terdapat apa yang disebut sebagai (*wage fund*), yaitu sejumlah dana yang secara khusus disediakan oleh dunia usaha untuk membayar tenaga kerja. Setelah keputusan investasi ditetapkan, besaran dana upah tersebut cenderung tetap, sehingga ruang bagi perubahan tingkat upah menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, upah tidak mudah meningkat karena terikat pada jumlah dana yang telah dialokasikan. Berdasarkan pemikiran para ekonom klasik tersebut, dapat disimpulkan adanya pandangan yang relatif pesimistis, di mana tingkat upah diperkirakan hanya berfluktuasi di sekitar level yang rendah.

Tingkat upah yang dimaksud sebagai tingkat rendah tersebut adalah tingkat yang sekadar mampu mempertahankan kelangsungan hidup. Konsep mempertahankan kehidupan ini mengandung implikasi bahwa standar upah merujuk pada kondisi yang telah ada atau berlaku sebelumnya. Apabila tingkat upah pada masa lalu berada pada level rendah, maka pada periode berikutnya cenderung tetap rendah.

Perkembangan gagasan tersebut lahir pada masa yang bersamaan dengan Revolusi Industri, ketika kebutuhan dan penyerapan tenaga kerja meningkat secara besar-besaran, namun tingkat upah yang diterima pekerja masih tergolong rendah. Kondisi tersebut tidak hanya disebabkan oleh rendahnya keterampilan tenaga kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap para pemimpin usaha yang pada saat itu kurang memberikan penghargaan yang memadai terhadap peran tenaga kerja.

3) Teori kelompok Neoklasik

Pandangan ini tetap dikategorikan sebagai klasik karena sejalan dengan gagasan mengenai pentingnya kebebasan dalam berwirausaha. Namun, perubahan yang diperkenalkan menekankan pergeseran sikap yang lebih optimis dan tidak lagi bersifat pesimis. Konsep utama dari pandangan ini adalah bahwa tingkat gaji dapat dijaga atau ditingkatkan asalkan selaras dengan nilai marginal dari tenaga kerja. Berdasarkan aliran pemikiran ini, gaji pada dasarnya ditentukan dan disamakan dengan nilai pasar dari produk marginal yang dihasilkan oleh tenaga kerja.

Aliran gagasan ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di tingkat mikro memiliki keberagaman, sehingga gaji yang diterima tidak sama di antara individu. Setiap variasi dalam kualitas tenaga kerja akan menghasilkan tingkat produk marginal yang berbeda, yang selanjutnya mempengaruhi

besaran gaji bagi setiap orang. Kualitas tenaga kerja menjadi landasan utama dalam pencapaian produktivitas dan sangat ditentukan oleh besarnya modal insani yang tertanam dalam diri pekerja. Modal insani tersebut mencakup pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, serta kondisi kesehatan. Semakin besar investasi pada modal insani, semakin tinggi pula kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Kerangka pemikiran mazhab neoklasik ini hingga kini masih mendominasi pandangan ekonomi modern. Meskipun telah mengalami berbagai penyesuaian dan pengembangan, secara prinsip pendekatan tersebut tetap bertumpu pada dasar pemikiran yang sama.

2.2.2 Indikator Penetapan Upah Minimum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2013, penetapan upah minimum dilakukan dengan berlandaskan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sekaligus memperhatikan produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya KHL melalui penyesuaian besaran upah minimum agar sesuai dengan nilai KHL pada periode yang bersangkutan.

Menurut Bersales (2014), penetapan upah minimum juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain, di antaranya sebagai berikut:

1) Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan alat ukur yang menilai total pengeluaran untuk barang dan jasa yang digunakan oleh masyarakat (Mankiw, 2013). IHK berfungsi untuk mengamati fluktuasi biaya hidup dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui seberapa besar penyesuaian pendapatan yang dibutuhkan untuk menjaga agar standar hidup tetap stabil.

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja diartikan sebagai keseluruhan orang yang terdiri dari mereka yang sedang bekerja dan yang tidak memiliki pekerjaan (Mankiw, 2013). Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang kerap digunakan untuk menilai seberapa banyak penduduk usia kerja berpartisipasi dalam kegiatan di pasar tenaga kerja.

3) Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan di suatu wilayah selama periode tertentu, yang dihitung berdasarkan harga pasar (Mankiw, 2018). Dalam penggunaannya, data PDRB tidak hanya berfungsi untuk mengukur total produksi, tetapi juga sering dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

4) Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita dapat diartikan sebagai rata-rata penghasilan yang diperoleh oleh setiap penduduk dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu (Sukirno, 2013). Tingkat kemakmuran masyarakat dinilai meningkat apabila pendapatan per kapita berdasarkan harga konstan atau pendapatan per kapita riil terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.

2.3 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama pendidikan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan sejauh mana tingkat pendidikan dalam sebuah komunitas. Semakin tinggi nilai rata-rata pendidikan, semakin banyak tahun pendidikan formal yang telah berhasil diselesaikan oleh masyarakat. Indikator ini dihitung melalui dua elemen utama, yaitu Tahun Pendidikan yang Diharapkan dan Rata-rata Tahun Pendidikan. Tahun Pendidikan yang Diharapkan menggambarkan estimasi jumlah tahun pendidikan yang mungkin akan diselesaikan oleh seorang anak, sedangkan Rata-rata Tahun Pendidikan mencerminkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah didapatkan oleh mereka yang berusia 15 tahun ke atas, tanpa termasuk tahun yang diulang. Umumnya, peningkatan dalam tingkat pendidikan disertai dengan perbaikan kemampuan intelektual dan keterampilan, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas individu dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, rata-rata lama sekolah berfungsi sebagai indikator yang mencerminkan durasi keterlibatan seseorang dalam proses pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga jenjang pendidikan tertinggi yang berhasil dicapai. Rata-rata lama sekolah, atau *Mean Years of Schooling* (MYS), dihitung dengan memperhitungkan tingkat partisipasi individu dalam pendidikan, jenjang pendidikan yang ditempuh, jumlah tahun studi yang dijalani, serta tingkat pendidikan yang telah diselesaikan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpengetahuan, terampil, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pelaksanaan pendidikan yang terencana dan sistematis agar peserta didik mampu secara aktif mengembangkan potensi serta kemampuannya.

Dalam teori Kuznets sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Apriliana, pendidikan dipandang sebagai salah satu upaya penting untuk keluar dari jerat kemiskinan di berbagai negara. Hal ini ditunjukkan oleh anggapan bahwa individu yang mengharapkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi perlu memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Namun, kelompok masyarakat miskin umumnya menghadapi keterbatasan biaya untuk menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, seperti sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa

tingkat pendidikan seseorang memiliki keterkaitan erat dengan peluang peningkatan kesejahteraan, sehingga rendahnya tingkat pendidikan berpotensi memperbesar risiko kemiskinan.

2.3.1 Teori Rata-Rata Lama Sekolah

1) Teori *Human Capital*

Teori modal manusia (*human capital*) menekankan bahwa investasi dalam pendidikan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja. Melalui pendidikan, individu dapat berkembang dan memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan. Di tingkat wilayah, kualitas pendidikan biasanya diukur dengan rata-rata lama sekolah, yang mencerminkan kemampuan sumber daya manusia. Konsep *Human Capital* menjadi kerangka penting dalam studi pendidikan karena menggambarkan tingkat keterampilan dan kapasitas tenaga kerja. Becker (1964), dalam bukunya *Human Capital* menegaskan bahwa pendidikan berperan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Becker, orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi biasanya bisa mendapatkan pekerjaan dan gaji yang lebih baik, sehingga lebih mungkin untuk menghindari kemiskinan.

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan dapat dievaluasi melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu komponen utama dalam IPM yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia adalah dimensi

pendidikan. Pengukuran aspek pendidikan dalam IPM saat ini dilakukan dengan menggunakan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Menurut Mankiw dan Gregory, pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi individu, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh, semakin besar peluang peningkatan kesejahteraan yang dapat diperoleh. Kondisi tersebut pada akhirnya berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang.

2.3.2 Indikator Rata-Rata Lama Sekolah

Tingkat pendidikan rata-rata suatu masyarakat dapat diukur dari lamanya penduduk berusia 15 tahun ke atas mengikuti pendidikan formal. Sejak 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) menggunakan rata-rata lama pendidikan sebagai salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini berperan sebagai tolok ukur kemajuan pembangunan manusia dan menjadi dasar perumusan kebijakan program pendidikan wajib nasional. Rata-rata lama pendidikan mencerminkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh dan diselesaikan oleh penduduk di berbagai jenjang, sehingga menggambarkan kualitas pendidikan yang tersedia bagi masyarakat di suatu wilayah. Perhitungan rata-rata lama pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tingkat partisipasi dalam pendidikan, jenjang atau kelas yang sedang

dijalani maupun telah diselesaikan, serta tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$MYS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Lama Sekolah Penduduk}$$

Rencana yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan dilaksanakan melalui program pendidikan wajib belajar selama 12 tahun. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi penduduk berusia 16 hingga 19 tahun, khususnya mereka yang sedang menempuh pendidikan menengah, seperti Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Islam, serta satuan pendidikan lain yang setara lainnya.

2.4 Hubungan Antar Variabel:

Hubungan antar variabel adalah keterkaitan atau ketergantungan antara dua atau lebih variabel dalam suatu penelitian, di mana perubahan pada satu variabel diharapkan berkaitan secara sistematis dengan perubahan pada variabel lainnya. Dengan kata lain, memahami hubungan antar variabel membantu peneliti menjawab pertanyaan “apakah dan bagaimana variabel-variabel tersebut saling memengaruhi” dalam kerangka hipotesis atau teori yang diuji (Sugiyono, 2021).

2.4.1 Hubungan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Upah minimum adalah besaran upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah dan digunakan sebagai pedoman oleh pemberi kerja dalam menentukan gaji atau kompensasi yang diterima oleh pekerja di suatu perusahaan. Menurut Kaufman dan Hotchkiss, terdapat hubungan antara besaran upah dan tingkat pengangguran, di mana peningkatan upah yang ditetapkan pemerintah cenderung berimplikasi pada penurunan jumlah tenaga kerja yang terserap. Sebaliknya, apabila upah minimum di suatu wilayah ditetapkan terlalu rendah, kondisi tersebut juga dapat memicu meningkatnya tingkat pengangguran. Dari sudut pandang pengusaha, kenaikan upah akan diikuti oleh meningkatnya biaya produksi, sehingga untuk menekan pengeluaran, perusahaan dapat mengambil langkah efisiensi berupa pengurangan jumlah tenaga kerja (Rosaria, 2022).

Dalam pandangan Malthus yang mewakili aliran klasik, analisis ekonomi lebih menekankan pada sisi penawaran (*supplyside economies*), sebuah pendekatan yang kembali memperoleh perhatian dalam perkembangan ekonomi modern. Upah dipandang sebagai harga dari penggunaan tenaga kerja dan besarnya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kerja itu sendiri. Sumber utama pasokan tenaga kerja berasal dari populasi yang berada dalam usia produktif. Kenaikan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya pasokan tenaga kerja, yang berpotensi menekan tingkat upah. Sebaliknya, jika jumlah penduduk menurun, pasokan tenaga kerja berkurang

sehingga upah cenderung naik. Atas dasar ini, upaya untuk menaikkan upah dinilai tidak memberikan manfaat dalam jangka panjang, karena peningkatan upah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kecenderungan untuk memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih besar. Pertambahan penduduk tersebut pada akhirnya kembali menambah penawaran tenaga kerja dan menekan upah ke tingkat sebelumnya. Sebaliknya, penurunan upah dapat menurunkan tingkat kesejahteraan, mendorong masyarakat untuk mengurangi pengeluaran, serta membatasi jumlah anak, sehingga pertumbuhan penduduk melambat. Situasi tersebut selanjutnya akan mengurangi pasokan tenaga kerja dan mendorong kenaikan upah kembali ke posisi semula. Dengan demikian, dalam jangka panjang, tingkat upah akan mengalami fluktuasi seiring perubahan jumlah penduduk dan pada akhirnya cenderung kembali ke titik keseimbangan awal.

2.4.2 Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sektor pendidikan memiliki peran yang sangat penting karena secara langsung menunjang proses produksi serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, sebab peningkatan tingkat pendidikan akan memperbesar kemampuan penyerapan tenaga kerja dan pada akhirnya menekan tingkat pengangguran. Kondisi tersebut

memungkinkan proses pembangunan berjalan secara optimal dan membuka peluang peningkatan kualitas hidup masyarakat di masa depan. Studi tentang investasi dalam pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pendekatan modal manusia. Modal manusia adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan pendidikan, kesehatan, dan kapasitas individu lainnya yang jika ditingkatkan akan meningkatkan produktivitas. Pendidikan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk mengadopsi teknologi modern dan mengembangkan kapasitas individu, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, modal manusia mencerminkan nilai dan kualitas sumber daya manusia yang menentukan tingkat potensi seseorang atau tenaga kerja dalam berproduksi, khususnya dalam menghasilkan barang dan jasa dalam perekonomian (Ernawaningtyas, 2021).

Peningkatan di bidang pendidikan dan kesehatan langsung memperbaiki kemampuan kerja tenaga kerja, sehingga meningkatkan kebutuhan akan pekerja dan akhirnya menurunkan tingkat pengangguran. Dalam pendekatan Keynesian, peningkatan kemampuan membeli barang dan jasa, yang terlihat dari standar hidup yang baik, terukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), akan meningkatkan permintaan keseluruhan, yang pada akhirnya menciptakan lebih banyak peluang kerja. Sebaliknya, ketika permintaan agregat berada pada tingkat yang rendah, perusahaan cenderung mengurangi volume produksi sehingga

penyerapan tenaga kerja menurun. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat IPM yang tinggi di suatu wilayah cenderung berkaitan dengan penurunan tingkat pengangguran, sedangkan IPM yang rendah berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran di daerah tersebut (Dea Erlangga, 2020).

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian terdahulu memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan suatu karya ilmiah. Keberadaan penelitian terkait mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antarvariabel yang akan dianalisis, sehingga dapat memperkuat landasan teoritis dan membantu peneliti dalam merumuskan kerangka pemikiran serta arah penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas faktor-faktor yang berkaitan dengan "Pengaruh Upah Minimum Provinsi dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka". Penelitian oleh Desembriarto (2021) berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul" menunjukkan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan rata-rata lama sekolah. Selanjutnya, Siskawati dkk (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Harapan Lama Sekolah, Rata –Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten /

Kota Provinsi Riau” menekankan pengaruh tingkat pendidikan. Penelitian oleh Mustakim dkk (2022) dengan judul “Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Kendari Tahun 2010-2021” menyoroti pentingnya rata-rata lama sekolah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Johar dkk (2023), berjudul “Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka: Mediasi Laju Pertumbuhan Ekonomi” mengatakan bahwa tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Baihawafi & Sebayang (2023) dalam studi berjudul “Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terbuka” menegaskan pengaruh upah terhadap tingkat pengangguran. Sementara itu, Sahara & Iryani (2023) melalui penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Inflasi Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat” mengungkapkan bahwa faktor upah minimum sangat menentukan. Erlangga dkk (2024) dalam penelitiannya “Pengaruh Upah Minimum dan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia 2014-2023” menyoroti peran upah terhadap tingkat pengangguran. Terakhir, penelitian oleh Apriliana & Setyawijaya (2024) berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Kemiskinan, Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Propinsi Banten” menunjukkan peran dari faktor upah minimum.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No.	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Desembriarto (2021) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul	regresi linier sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sedangkan rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh secara signifikan	Meneliti variabel Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	Meneliti variabel Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, menggunakan metode regresi data panel, dan lokasi penelitian di Provinsi Aceh
2.	Siskawati, dkk (2021) Pengaruh Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten / Kota Provinsi Riau	Analisis regresi linear berganda	Rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka	Meneliti variabel Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran	Meneliti variabel Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, menggunakan metode regresi data panel, dan lokasi penelitian di Provinsi Aceh

3.	Mustakim, dkk (2022) Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Kendari Tahun 2010-2021	Analisis regresi linear sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka	Meneliti variabel Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	Meneliti variabel Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, menggunakan metode regresi data panel dan lokasi penelitian di Provinsi Aceh
4.	Johar, dkk (2023) Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka: Mediasi Laju Pertumbuhan Ekonomi	Analisis path	Rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka secara <i>partial mediation</i>	Meneliti variabel Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	Meneliti variabel Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, menggunakan metode regresi data panel dan lokasi penelitian di Provinsi Aceh
5.	Baihawafi & Sebayang (2023) Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terbuka	regresi data panel dengan pendekatan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	Variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat	Meneliti variabel Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	Meneliti variabel Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan lokasi penelitian di Provinsi Aceh

6.	Sahara & Iryani (2023) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Inflasi Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat	metode <i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Barat.	Meneliti variabel Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	Meneliti variabel Rata- Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, menggunakan metode regresi data panel, dan lokasi penelitian di Provinsi Aceh
7.	Erlangga, dkk (2024) Pengaruh Upah Minimum dan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia 2014-2023	Regresi linier berganda	Upah minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka	Meneliti variabel Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	Meneliti variabel Rata- Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, menggunakan metode regresi data panel, dan lokasi penelitian di Provinsi Aceh

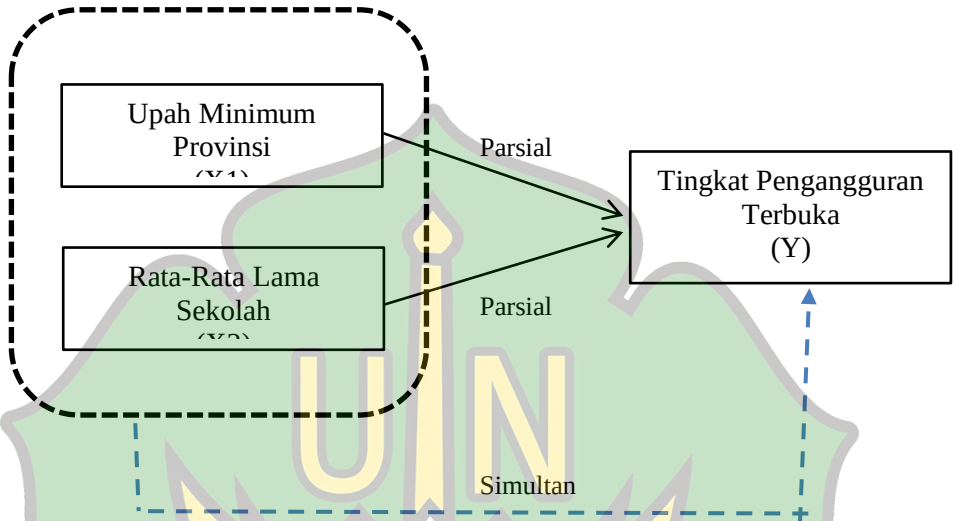
8.	Apriliana & Setyawijaya (2024) Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Kemiskinan, Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Propinsi Banten	Analisis regresi linier berganda	Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten	Meneliti variabel Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	Meneliti variabel Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, menggunakan metode regresi data panel, dan lokasi penelitian di provinsi aceh
----	--	----------------------------------	---	---	---

Sumber: Diolah (2025)

2.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka teori yang digunakan, penelitian ini menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Rata-Rata Lama Sekolah sebagai variabel independen (X_1 dan X_2) yang diperkirakan memiliki pengaruh yang substansial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel dependen (Y). Analisis dilakukan baik secara parsial maupun simultan untuk memperjelas hubungan antar variabel tersebut. Kerangka pemikiran penelitian selanjutnya disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



2.7 Hipotesis Penelitian

Berlandaskan penjabaran latar belakang penelitian, tinjauan pustaka, serta kerangka konseptual yang telah dirincikan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan menjadi:

- Ho₁ : Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.
- Ha₁ : Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.
- Ho₂ : Rata-Rata Lama Sekolah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.
- Ha₂ : Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.

Ho₃ : Upah Minimum Provinsi dan Rata-Rata Lama Sekolah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.

Ha₃ : Upah Minimum Provinsi dan Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan pada paradigma positivisme. Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis populasi tertentu atau sampel yang dipilih. Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen penelitian, sementara analisisnya menggunakan metode kuantitatif atau statistik. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menguji hipotesis secara objektif dan terukur (Sugiyono, 2021).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis dengan pendekatan regresi data panel. Metode regresi data panel menggabungkan unsur *time series* dan *cross section* untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antar variabel. Dengan memanfaatkan data panel, analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam karena mampu menangkap variasi sepanjang waktu dan perbedaan antar daerah. Sumber referensi data yang digunakan dalam studi mencakup:

1. Data Upah Minimum Provinsi tahun 2017-2024 yang didapat dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh.
2. Data Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2017-2024 yang diperoleh pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh.

3. Data Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2017-2024 yang diperoleh pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh.

3.3 Sampel Penelitian

Sampel yang dipakai pada penelitian ini merupakan data Upah Minimum Provinsi, Rata-Rata Lama Sekolah dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2017-2024 (5 tahun).

3.4 Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis variabel, yaitu:

1. Variabel Terikat (*Dependen*)

Variabel terikat (*Dependen*) pada penelitian ini ialah Tingkat Pengangguran Terbuka (Y).

2. Variabel Bebas (*Independen*)

Variabel bebas (*Independen*) pada penelitian ini ialah Upah Minimum Provinsi (X1) dan Rata-Rata Lama Sekolah (X2).

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Berdasarkan klasifikasi variabel yang telah di uraikan diatas, berikut ini tabel penjelasan untuk definisi operasional variabel, yaitu:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Sumber Data	Satuan Data
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)	Persentase angka pengangguran dibanding total angkatan kerja di Provinsi Aceh selama periode 2017 hingga 2024.	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh	Persen
2.	Upah Minimum Provinsi (X1)	Standar upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur di Provinsi Aceh pada tahun 2017-2024.	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	Ribu Rupiah
3.	Rata-Rata Lama Sekolah (X2)	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk mengikuti semua jenis pendidikan yang pernah ditempuh di Provinsi Aceh pada tahun 2017-2024.	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh	Tahun

3.6 Metode Analisis Data

Cara yang dipakai untuk mengkaji data dalam penelitian ini adalah regresi panel, yakni metode *least squares panel*. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Dalam metode ini, perbedaan antar individu maupun perbedaan dari waktu ke waktu juga diperhitungkan. Metode ini dianggap lebih baik karena mampu memberikan informasi yang lebih luas dan beragam dibandingkan jika hanya menggunakan data cross section atau time series secara terpisah. Secara umum, bentuk

persamaan model regresi data panel dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan:

- α = Konstanta
- β = Koefisien
- Y = Variabel terikat (Dependen)
- X = Variabel bebas (Independen)
- ε = *error term* (error)
- i = *cross section* (Kabupaten/Kota)
- t = *time series* (tahun)

Berdasarkan persamaan 3.1 maka penelitian akan menganalisa pengaruh dari variabel Upah Minimum Provinsi dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka, maka untuk persamaannya ialah:

$$TPT_{it} = \alpha + \beta_1 LogUMP_{it} + \beta_2 RLS_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

Keterangan:

- α = Konstanta
- β_n = Koefisien
- TPT_{it} = Tingkat Pengangguran Terbuka dari kabupaten/kota (i), tahun (t)

LogUMP_{it}	=	Logaritma Upah Minimum Provinsi dari kabupaten/kota (i), tahun (t)
RLS_{it}	=	Rata-Rata Lama Sekolah dari kabupaten/kota (i), tahun (t)
ε	=	<i>error term</i> (error)
i	=	<i>cross section</i> (Kabupaten/Kota)
t	=	<i>time series</i> (tahun)

3.7 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah model regresi panel. Model ini dapat dihitung dengan memanfaatkan tiga metode, yaitu CEM/PLS, FEM, dan REM.

1. Model *Common Effect* (CEM)/(PLS)

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang dianalisis melalui regresi panel. Regresi panel merupakan teknik analisis yang mengintegrasikan data dari rentang waktu dengan data potongan silang. Melalui penggunaan data panel, analisis yang lebih komprehensif dapat dilakukan karena pendekatan ini dapat menangkap perubahan dari waktu ke waktu serta variasi di antara lokasi. Sumber data yang digunakan dalam studi ini adalah:

$$TPT_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LogUMP}_{it} + \beta_2 \text{RLS}_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3.3)$$

Keterangan:

α = Konstanta

β_n = Koefisien

TPT_{it} = Tingkat Pengangguran Terbuka dari kabupaten/kota (i), tahun (t)

LogUMP_{it} = Logaritma Upah Minimum Provinsi dari kabupaten/kota (i), tahun (t)

RLS_{it} = Rata-Rata Lama Sekolah dari kabupaten/kota (i), tahun (t)

ε = *error term* (error)

i = *cross section* (Kabupaten/Kota)

t = *time series* (tahun)

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Model ini ialah teknik analisis data yang mempunyai efek individu yang berbeda dengan memakai metode model efek tetap (*Fixed Effect Model*)/*least squares dummy variabel* (LSDV) yang sering dinamai dengan variabel dummy. Model ini mengasumsikan intersep antar objek ialah berbeda, sedangkan untuk intersep antar waktu ialah sama. Maka untuk persamaannya ialah:

$$TPT_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LogUMP}_{it} + \beta_2 \text{RLS}_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3.4)$$

Keterangan:

α = Konstanta

β_n = Koefisien

TPT_{it} = Tingkat Pengangguran Terbuka dari kabupaten/kota (i), tahun (t)

LogUMP_{it} = Logaritma Upah Minimum Provinsi dari kabupaten/kota (i), tahun (t)

RLS_{it} = Rata-Rata Lama Sekolah dari kabupaten/kota (i), tahun (t)

ε = *error term* (error)

i = cross section (Kabupaten/Kota)

t = time series (tahun)

3. Model *Random Effect* (REM)

Model ini merupakan pendekatan yang menggunakan penambahan komponen gangguan yang memungkinkan adanya keterkaitan antara individu dan dimensi waktu. Dalam pendekatan ini diasumsikan bahwa perbedaan nilai intersep antarobjek maupun antarperiode waktu tidak dimodelkan secara eksplisit, melainkan dimasukkan ke dalam komponen residual atau *error*. Oleh karena itu, model ini dikenal sebagai model komponen galat atau *error component model* (ECM). Proses estimasi pada model ini dilakukan dengan menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS). Dengan demikian, bentuk persamaan model dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$TPT_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LogUMP}_{it} + \beta_2 \text{RLS}_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3.5)$$

Keterangan:

α = Konstanta

β_n = Koefisien

TPT_{it} = Tingkat Pengangguran Terbuka dari kabupaten/kota (i), tahun (t)

LogUMP_{it} = Logaritma Upah Minimum Provinsi dari kabupaten/kota (i), tahun (t)

RLS_{it} = Rata-Rata Lama Sekolah dari kabupaten/kota (i), tahun (t)

ε = error term (error)

i = cross section (Kabupaten/Kota)
t = time series (tahun)

3.8 Pengujian Data Panel

Uji data panel dapat dipilih melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Uji Chow/Likelihood Ratio

Uji ini dipakai agar dapat mengetahui model terbaik antar CEM/PLS dengan FEM. Maka untuk hipotesisnya ialah:

H_0 = Model CEM/PLS

H_1 = Model FEM

Jika nilai prob. $> \alpha$ (0.05) H_0 (diterima) dan H_1 (ditolak), jadi model yang dipilih ialah Model (CEM). Sebaliknya, jika nilai prob. $< \alpha$ (0,05) H_0 (ditolak) dan H_1 (diterima), jadi model yang dipilih ialah Model (FEM).

2. Uji Haustman/Haustman Test

Uji ini dipakai agar dapat mengetahui model terbaik antar REM dengan FEM. Maka untuk hipotesisnya ialah:

H_0 = Model REM

H_1 = Model FEM

Apabila nilai probabilitas melebihi tingkat signifikansi α (0,05), maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_1) ditolak, sehingga model yang paling sesuai digunakan adalah *Random Effect Model* (REM). Sebaliknya, apabila nilai probabilitas berada lebih rendah dari α (0,05), H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang tepat untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

3. Uji LM/Lagrange Multiplier Test

Uji ini dipakai agar dapat mengetahui model terbaik antar CEM dengan REM. Maka untuk hipotesisnya ialah:

$$H_0 = \text{Model CEM}$$

$$H_1 = \text{Model REM}$$

Jika nilai prob. $> \alpha$ (0,05) H_0 (diterima) dan H_1 (ditolak), jadi model yang dipilih ialah Model (CEM). Sebaliknya, jika nilai prob. $< \alpha$ (0,05) H_0 (ditolak) dan H_1 (diterima), jadi model yang dipilih ialah Model (REM).

3.9 Pengujian Hipotesis Data Panel

Uji hipotesis data panel pada penelitian ini ada tiga yang dilakukan, yaitu:

1. Uji T (Parsial)

Uji ini dilakukan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_0: \beta_1, \beta_2 = \text{Tidak berpengaruh (Signifikan)}$$

$$H_a: \beta_1, \beta_2 = \text{Berpengaruh (Signifikan)}$$

Variabel independen dianggap berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen jika nilai probabilitas t-statistik berada di bawah tingkat signifikansi α (0,05). Sebaliknya, jika nilai probabilitas t-statistik melebihi batas

signifikansi tersebut, maka variabel bebas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

2. Uji F (Simultan)

Uji ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana variabel bebas (*independent*) secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel terikat (*dependent*). Berdasarkan tujuan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_1, \beta_2 =$ Tidak berpengaruh (Signifikan)

$H_a: \beta_1, \beta_2 =$ Berpengaruh (Signifikan)

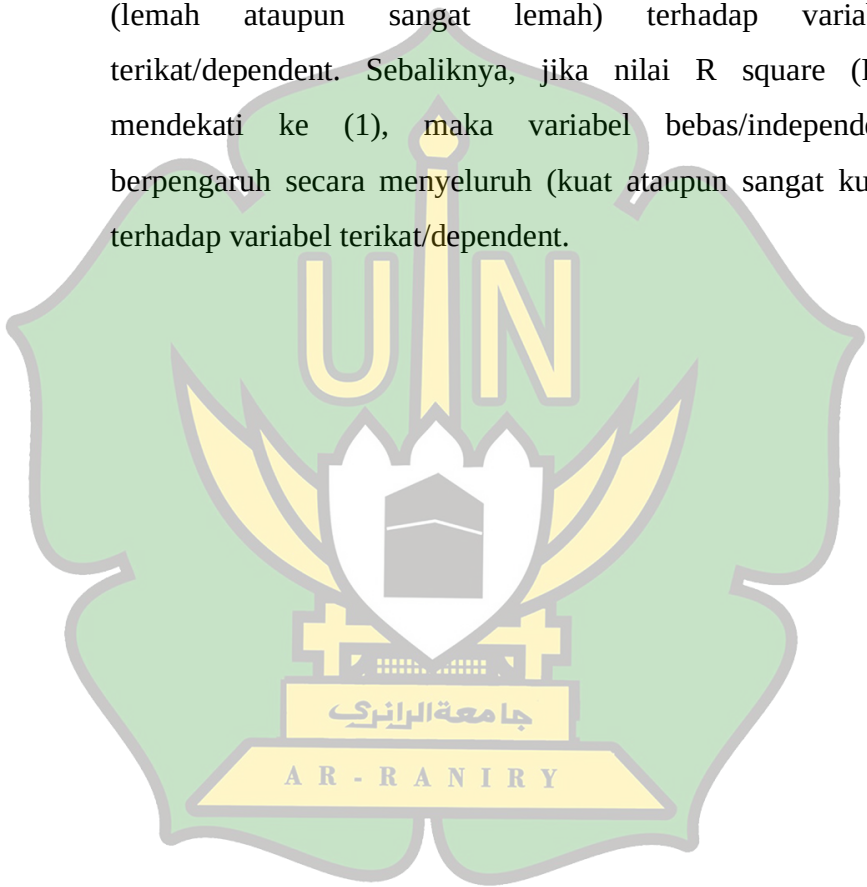
Apabila nilai probabilitas F-statistik lebih rendah daripada tingkat signifikansi α (0,05), mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen secara serentak berdampak signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F-statistik lebih tinggi dari α (0,05), maka variabel independen secara kolektif tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap variabel dependen.

3. R Square (R^2)/Koefisien Determinasi

Uji ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas (*independent*) mampu menjelaskan variasi perubahan variabel terikat (*dependent*) secara keseluruhan. Nilai koefisien determinasi atau R Square (R^2) berada pada rentang antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$), di mana semakin mendekati angka

1 menunjukkan kemampuan penjelasan model yang semakin baik.

Jika nilai R square (R^2) mendekati ke (0), maka variabel bebas/independent berpengaruh secara tidak menyeluruh (lemah ataupun sangat lemah) terhadap variabel terikat/dependent. Sebaliknya, jika nilai R square (R^2) mendekati ke (1), maka variabel bebas/independent berpengaruh secara menyeluruh (kuat ataupun sangat kuat) terhadap variabel terikat/dependent.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian

Aceh ialah salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di pulau Sumatra. Dari segi geografis, posisi Aceh berada di ujung barat Pulau Sumatra, dengan Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan dan administrasi. Luas wilayah Aceh mencapai kurang lebih 5.677.081 hektar yang secara administratif terbagi ke dalam 18 kabupaten dan 5 kota, meliputi 290 kecamatan serta 6.516 gampong atau desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, jumlah keseluruhan masyarakat Aceh pada tahun 2024 diproyeksikan sekitar 5,554 juta jiwa.

Gambar 4.1
Peta Lokasi Penelitian



Sumber: Wikipedia (2025)

Provinsi Aceh, menempati ujung barat Pulau Sumatra tepatnya pada koordinat 2°–6° lintang utara dan 95°–98° bujur timur, dengan rata-rata ketinggian sekitar 125 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, Aceh bersebelahan dengan Provinsi Sumatra Utara di selatan, Samudra Hindia di bagian barat, serta Selat Malaka di sisi utara dan timur. Berdasarkan informasi dari situs resmi Badan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Aceh (PPID), luas wilayah Provinsi Aceh mencakup 5. 677. 081 hektar. Penggunaan lahan di daerah ini didominasi oleh kawasan hutan yang seluas 2. 270. 080 hektar, sebagai kategori penggunaan lahan terbesar, diikuti oleh perkebunan kecil seluas sekitar 700. 350 hektar.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Studi ini dilakukan untuk menyajikan sebuah pandangan awal mengenai berbagai faktor yang diterapkan dalam penelitian, sehingga mempermudah pemahaman tentang fenomena yang sedang diamati. Hasil pengolahan data menghasilkan statistik deskriptif yang menggambarkan karakteristik masing-masing variabel. Melalui statistik deskriptif dari ketiga variabel tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran awal tentang karakteristik serta sebaran data, sehingga membantu dalam memahami fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, hasilnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Analisis Statistik Deskriptif

	TPT	UMP	RLS
Mean	5,77	3069,823	9,43
Median	5,84	3165,000	9,08
Maximum	12,51	3660,900	13,10
Minimum	1,03	2500,000	7,12
Std. Dev.	2,27	319,2217	1,20
Observations	184	184	184

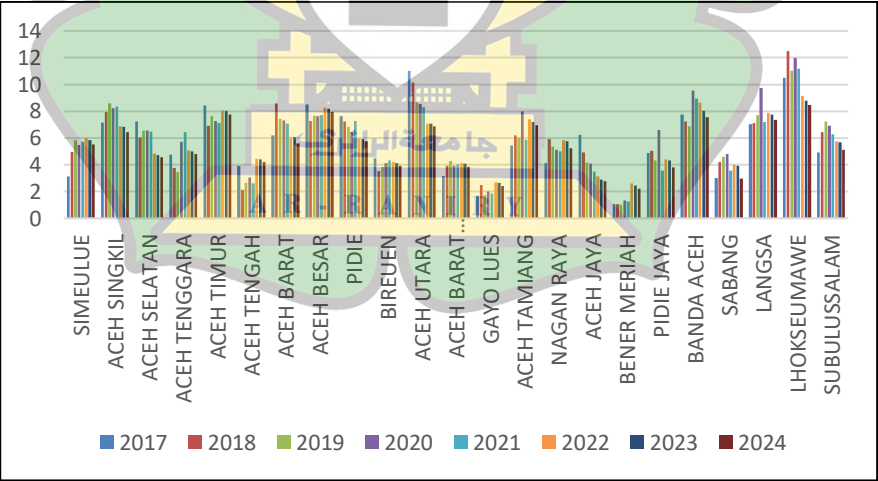
Sumber: Data Diolah (2025)

Merujuk pada Tabel 4.1 yang mencakup 184 observasi, kita dapat melihat beberapa statistik deskriptif mengenai ketiga variabel penelitian ini, yaitu untuk TPT nilai rata-rata sebesar 5,77 dengan nilai maximum sebesar 12,51 dan minimum 1,03, serta standar deviasi mencapai 2,27 mengindikasikan adanya fluktuasi TPT cukup nyata antar wilayah, dikarenakan perbedaan kondisi ekonomi antar wilayah atau waktu. Kemudian variabel upah minimum provinsi untuk rata-rata nilai sebesar 3069,823 dengan nilai maximum sebesar 3660,900 dan minimum sebesar 2500,000 serta standar deviasi 319,2217 sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan UMP yang cukup lebar selama periode observasi. Selanjutnya untuk RLS nilai rata-rata sebesar 9,43 dengan nilai maximum sebesar 13,10 dan minimum 7,12 serta standar deviasi mencapai 1,20 yang menandakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat cenderung lebih stabil dan merata, meskipun tetap terdapat perbedaan antar daerah maupun antar tahun dalam periode penelitian.

4.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran dapat diartikan sebagai orang yang tidak memiliki pekerjaan namun sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, sedang bersiap untuk memulai bisnis baru, telah mendapatkan tawaran kerja tetapi belum mulai bekerja, atau sedang dalam tahap pencarian pekerjaan. Ini juga mencakup mereka yang merasa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan telah kehilangan motivasi. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan parameter yang umumnya digunakan untuk memperkirakan persentase Angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan di bursa kerja dan menunjukkan sejauh mana tenaga kerja dimanfaatkan dalam suatu ekonomi.

Gambar 4.2
Perkembangan Data Tingkat Pengangguran Terbuka
di Provinsi Aceh 2017-2024



Sumber: BPS (2025)

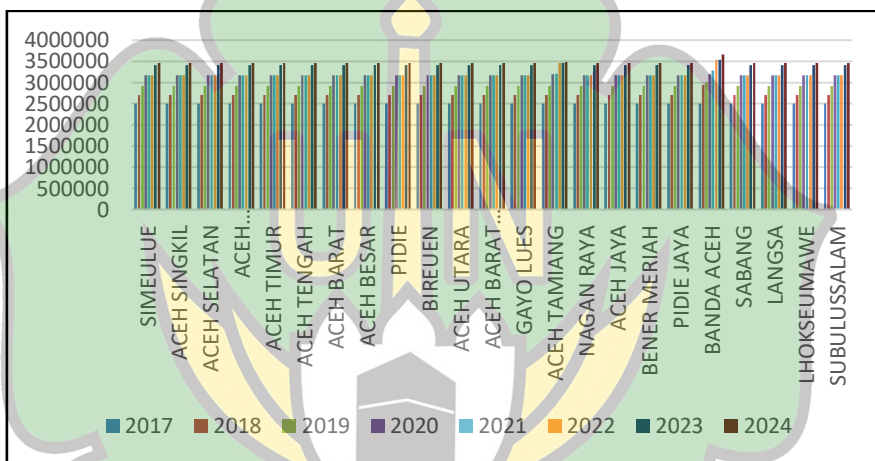
Berdasarkan Gambar 4.2, dapat dilihat bahwa perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh selama periode 2017–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif, ditandai dengan adanya peningkatan dan penurunan pada beberapa wilayah. Persentase TPT tertinggi tercatat di Kota Lhokseumawe pada tahun 2018, yaitu sebesar 12,51 persen yang disebabkan oleh kondisi ekonomi lokal yang kurang kondusif pada periode tersebut, seperti kontraksi di sektor industri dan jasa utama di kota tersebut, terbatasnya investasi baru, serta rendahnya penyerapan tenaga kerja oleh pengusaha akibat perlambatan usaha atau restrukturisasi perusahaan (BPS, 2020). Sedangkan yang terendah terdapat pada kabupaten Bener Meriah pada tahun 2019 sebesar 1,03 persen dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang positif sehingga mendorong terciptanya lebih banyak lapangan kerja. Peningkatan investasi juga mendukung pembukaan usaha baru dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang fokus pada pengembangan sektor tertentu, seperti pertanian atau pariwisata yang turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih spesifik (BPS, 2021).

4.2.2 Upah Minimum Provinsi

Upah adalah salah satu elemen kunci yang memengaruhi jumlah tenaga kerja yang tersedia dan berperan besar dalam tingkat penerimaan pekerja. Besaran upah yang ditentukan oleh perusahaan umumnya dipengaruhi oleh produktivitas, kualitas tenaga kerja, dan jumlah jam kerja secara keseluruhan. Pergerakan upah di Provinsi

Aceh menunjukkan pola peningkatan secara bertahap seiring berjalannya waktu. Peningkatan upah yang konsisten ini dapat berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Tahir, 2018).

Gambar 4.3
Perkembangan Upah Minimum Provinsi Aceh 2017-2024



Sumber: DISNAKERMOBDUK (2025)

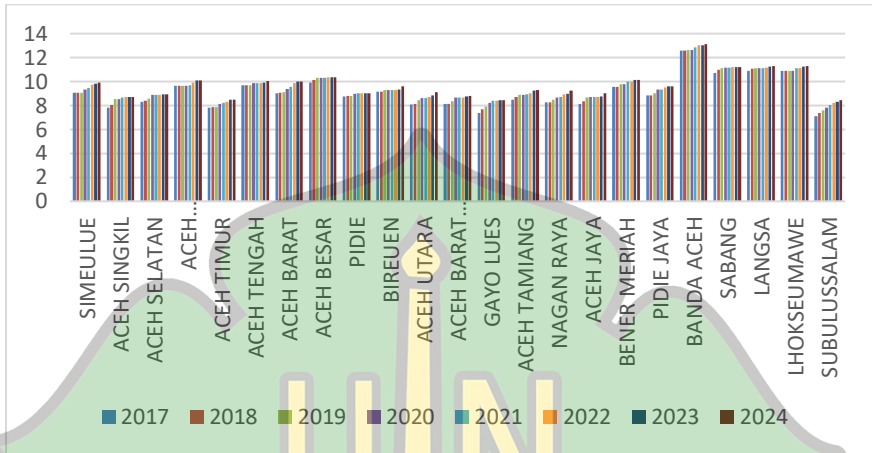
Menurut Gambar 4.3, terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir, Upah Minimum Provinsi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nilai upah tertinggi tercatat di Kota Banda Aceh pada tahun 2024, yaitu sebesar Rp3.660.898. Kondisi ini terjadi karena Banda Aceh memiliki dewan pengupahan daerah yang berwenang mengusulkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang lebih tinggi, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah serta biaya hidup yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sementara itu, sebagian besar

kabupaten di Aceh tetap menggunakan UMP karena belum menetapkan UMK sendiri (Disnakermobduk Aceh, 2024). Sedangkan yang terendah terdapat di 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh pada tahun 2017 sebesar 2.500.000 rupiah, karena sebagian besar kabupaten tidak mengajukan penetapan UMK dan otomatis mengikuti UMP Aceh, sedangkan Banda Aceh pada tahun 2018 mulai mengusulkan UMK yang lebih tinggi berdasarkan pertimbangan biaya hidup dan kondisi ekonomi kota. Penetapan UMK memang mensyaratkan rekomendasi dewan pengupahan daerah dan hanya berlaku jika diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga daerah yang tidak mengajukan tetap menggunakan UMP yang nilainya lebih rendah (DISNAKERMOBDUK, 2020).

4.2.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah parameter yang menggambarkan tingkat pencapaian pendidikan penduduk dalam sebuah wilayah. Nilai rata-rata lama sekolah yang tinggi mengindikasikan semakin panjang jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh masyarakat. Secara umum, peningkatan tingkat pendidikan diasumsikan berkorelasi positif dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia, baik dalam aspek cara berpikir, kompetensi, maupun sikap yang tercermin dalam aktivitas sosial dan ekonomi (Jannah & Sari, 2023).

Gambar 4.4
Perkembangan Data Rata-Rata Lama Sekolah
di Provinsi Aceh 2017-2024



Sumber: BPS (2025)

Berdasarkan Gambar 4.4, perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Aceh selama periode 2017–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi, yang ditandai oleh adanya peningkatan dan penurunan pada beberapa tahun. Pada tahun 2024, Kota Banda Aceh mencatat rata-rata lama pendidikan tertinggi sebesar 13,10 tahun. Hal ini dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas pendidikan yang lebih memadai, kondisi ekonomi masyarakat yang relatif stabil, serta kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang tinggi (BPS, 2024). Sedangkan yang terendah terdapat pada Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2017 sebesar 7,8 tahun yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterbatasan akses dan mutu pendidikan, kondisi tata kelola pendidikan yang belum optimal, serta faktor

sosial ekonomi masyarakat yang masih menjadi tantangan (BPS, 2020).

4.3 Analisis Penentuan Model Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel untuk mengkaji pengaruh Upah Minimum Provinsi dan Rata-Rata Lama Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh. Dalam analisis regresi data panel, tersedia tiga alternatif metode estimasi yang dapat digunakan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk menentukan model estimasi yang paling tepat dan representatif, dilakukan serangkaian uji pemilihan model yang meliputi uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier.

4.3.1 Uji Chow (*Chow-test*)

Uji Chow digunakan untuk memilih model estimasi yang paling tepat antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Apabila nilai probabilitas hasil pengujian lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka model yang direkomendasikan adalah *Common Effect Model*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka *Fixed Effect Model* dinilai lebih sesuai untuk digunakan. Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel yang diolah dengan menggunakan perangkat lunak E-Views 12, diperoleh hasil perhitungan untuk kedua pendekatan tersebut, yakni *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Chow (*Chow-test*)

<i>Chow-test</i>	<i>Statistic</i>	<i>P-value</i>
<i>Cross-section F</i>	46,811	0,000
<i>Cross-section Chi-square</i>	370,179	0,000

Sumber: Data Diolah (2025)

Tabel 4.2 menyajikan hasil pengujian Chow yang memperlihatkan nilai probabilitas *cross-section F* sebesar 0,000, yang berada di bawah tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *Common Effect Model*.

4.3.2 Uji Hausman (*Hausman-test*)

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan pendekatan estimasi yang paling efisien antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas *cross-section random*, di mana apabila nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas melebihi 0,05, maka *Random Effect Model* dinilai lebih tepat untuk digunakan. Berdasarkan hasil pengolahan regresi data panel dengan menggunakan perangkat lunak E-Views 12, diperoleh estimasi untuk kedua model tersebut sebagaimana disajikan berikut ini:

Tabel 4.3
Hasil Uji Hausman (*Hausman-test*)

<i>Hausman-test</i>	<i>Statistic</i>	<i>P-value</i>
<i>Cross-section random</i>	6,092	0,047

Sumber: Data Diolah (2025)

Tabel 4.3 menunjukkan hasil pengujian Hausman yang menghasilkan nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0,047, yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis nol dinyatakan ditolak sedangkan hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* merupakan pendekatan estimasi yang lebih sesuai untuk digunakan dibandingkan dengan *Random Effect Model*.

4.4 Model Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel yang telah melalui dua tahapan pengujian, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman, , dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Selanjutnya, hasil pengolahan I dan analisis data dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Estimasi Data Panel Metode *Fixed Effect Model* (FEM)

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>P-value</i>
C	3,8598	0,6389	0,5238
LOGUMP (X ₁)	1,4267	1,1985	0,2325
RLS (X ₂)	-1,0104	-2,0710	0,0400
<i>F-statistic</i>		45,9149	
<i>P-value (F-statistic)</i>		0,0000	
<i>R-squared</i>		0,8739	
<i>Adjusted R-squared</i>		0,8548	

Sumber: Data diolah (2025)

Model regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$\text{TPT} = 3,8598 + 1,4267\text{LOG(UMP)} - 1,0104\text{RLS} + \varepsilon$$

Keterangan:

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

LOGUMP : Log Upah Minimum Provinsi

RLS : Rata-Rata Lama Sekolah

ε : Error

Sesuai dengan hasil analisis regresi pada data panel menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) yang ditampilkan dalam Tabel 4. 5, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 3,8598 membuktikan bahwa apabila variabel Upah Minimum Provinsi (X₁) dan Rata-rata Lama Sekolah (X₂) diasumsikan bernilai nol atau tidak

berpengaruh, oleh karena itu Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Aceh selama periode 2017–2024 diperkirakan berada pada angka 3,8598.

- b. Koefisien regresi untuk variabel Upah Minimum Provinsi (X1) sebesar 1,4267 mengindikasikan adanya hubungan positif antara upah minimum provinsi dan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu rupiah pada upah minimum provinsi akan diikuti oleh peningkatan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,4267, dengan asumsi variabel lain dalam model berada dalam kondisi konstan di Provinsi Aceh selama periode 2017–2024.
- c. Koefisien regresi variabel Rata-Rata Lama Sekolah (X2) sebesar -1,0104 menunjukkan adanya hubungan negatif dari rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka. Dengan demikian, setiap adanya kenaikan satu tahun rata-rata lama sekolah diperkirakan dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,0104, dengan asumsi variabel lain dalam model tetap selama periode 2017–2024 di Provinsi Aceh.

4.5 Pengujian Hipotesis Penelitian

4.5.1 Uji Parsial (Uji-t)

Untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah, digunakan uji parsial.

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4.5, variabel Upah Minimum Provinsi (X_1) memiliki nilai koefisien sebesar 1,4267 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,2325, yang lebih besar daripada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Aceh selama periode 2017–2024. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sementara itu, variabel Rata-Rata Lama Sekolah (X_2) menunjukkan nilai koefisien sebesar -1,0104 dengan probabilitas sebesar 0,0400 yang lebih rendah dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Kondisi ini menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Aceh selama periode 2017–2024. Tanda positif pada koefisien menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara kedua variabel tersebut.

4.5.2 Uji Simultan (Uji-f)

Uji simultan digunakan untuk menilai pengaruh kolektif seluruh variabel independen, yakni Upah Minimum Provinsi dan Rata-Rata Lama Sekolah, terhadap variabel dependen berupa Tingkat Pengangguran Terbuka. Pengujian ini dilakukan melalui uji F dengan memperhatikan nilai probabilitas F-statistik pada tingkat

signifikansi $\alpha = 0,05$. Apabila nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari taraf signifikansi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F-statistik melebihi α , maka pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen dinyatakan tidak signifikan.

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada Tabel 4.5, model *Fixed Effect* menghasilkan nilai F-statistik sebesar 45,9149 dengan tingkat probabilitas 0,0000, yang berada di bawah batas signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (X1) dan Rata-Rata Lama Sekolah (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Aceh selama periode 2017–2024.

4.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merefleksikan proporsi variasi pada variabel dependen yang mampu diterangkan oleh variabel independen dalam suatu model analisis. Pada penelitian ini, variabel bebas yang digunakan terdiri atas Upah Minimum Provinsi (X1) dan Rata-Rata Lama Sekolah (X2). Berdasarkan informasi yang disajikan pada Tabel 4.5, nilai R^2 pada model *Fixed Effect* sebesar 0,8739. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut hanya mampu menjelaskan sekitar 87,39%% variasi Tingkat Pengangguran Terbuka, sementara sisanya sebesar 12,61% dipengaruhi oleh variabel lain di luar cakupan model penelitian ini.

4.6 Pembahasan dan Hasil Penelitian

4.6.1 Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, variabel Upah Minimum Provinsi memiliki koefisien sebesar 1,4267 yang menunjukkan adanya hubungan positif dengan Tingkat Pengangguran Terbuka. Nilai probabilitas sebesar 0,2325 lebih besar daripada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Hal ini menegaskan bahwa Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum cenderung berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran terbuka. Ketika upah minimum naik, pengangguran cenderung meningkat karena biaya tenaga kerja bagi perusahaan menjadi lebih tinggi, sehingga permintaan akan pekerja berkurang sesuai hukum permintaan-per penawaran di pasar tenaga kerja. Perusahaan sering merespons dengan mengurangi perekrutan pekerja baru (terutama pemula atau *low-skilled*), memindahkan produksi ke daerah dengan upah lebih rendah, atau bahkan menutup operasi di wilayah tersebut, yang menyempitkan peluang kerja secara keseluruhan. Studi seperti dari World Bank Indonesia menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum 10% dapat meningkatkan pengangguran hingga 0,8%, karena investor enggan berinvestasi di area dengan biaya buruh mahal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Erlangga et al., (2024), yang menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia . Temuan yang sejalan juga dikemukakan oleh Apriliana dan Setyawijaya (2024), yang menyatakan bahwa Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten. Keseragaman hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan Upah Minimum Provinsi tidak secara langsung diikuti oleh penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Dalam konteks teori ekonomi klasik, penetapan gaji minimum yang lebih tinggi dari tingkat keseimbangan yang terbentuk melalui interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja akan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Keadaan ini dapat menyebabkan menurunnya permintaan terhadap tenaga kerja, sehingga perusahaan mungkin akan mengurangi jumlah pekerja, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran terbuka jika tidak diimbangi dengan penciptaan pekerjaan baru. Selain itu, biaya tenaga kerja yang lebih tinggi dapat mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan jam kerja, penundaan perekrutan, atau substitusi tenaga kerja dengan teknologi, yang semakin menekan kesempatan kerja, terutama bagi tenaga kerja dengan pendidikan rendah. Oleh karena itu, penetapan upah minimum perlu memperhatikan kondisi ekonomi daerah agar tujuan peningkatan kesejahteraan pekerja dapat

tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif yang berlebihan terhadap pengangguran (Putra et al., 2021).

Di sisi lain, dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan struktur pasar tenaga kerja yang relatif tidak sensitif terhadap kenaikan upah, peningkatan Upah Minimum Provinsi justru dapat meningkatkan daya beli pekerja tanpa menimbulkan kenaikan pengangguran yang signifikan. Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam terkait hubungan antara upah minimum dan pengangguran, yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah dan pendekatan metodologis yang digunakan. Beberapa studi menemukan adanya korelasi negatif antara upah minimum dan tingkat pengangguran terbuka, menunjukkan adanya kenaikan upah minimum dapat memengaruhi tingkat pengangguran tergantung pada kondisi ekonomi regional dan faktor pendukung lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi (Putra et al., 2021).

4.6.2 Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, variabel Rata-Rata Lama Sekolah memiliki koefisien sebesar -1,0104 yang mencerminkan adanya hubungan negatif dan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,0400, yang lebih rendah dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05), sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh. Temuan ini

mengindikasikan bahwa peningkatan rata-rata lama pendidikan penduduk mampu menekan tingkat pengangguran terbuka di wilayah tersebut. Rata-rata lama sekolah mampu menurunkan tingkat pengangguran karena pendidikan yang lebih panjang meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja di pasar kerja, sehingga individu lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan perusahaan lebih memilih merekrut pekerja terampil. Proses ini juga memediasi melalui pertumbuhan ekonomi, di mana pendidikan berkontribusi pada peningkatan output ekonomi yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Mustakim et al., (2022), yang menyatakan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota kendari. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Afifah et al., (2023) yang menyimpulkan bahwa variabel Rata-Rata Lama Sekolah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah cenderung diikuti oleh penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun masa depan suatu bangsa karena berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil analisis regresi dalam penelitian ini, secara parsial tingkat pendidikan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

tingkat pengangguran terbuka. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan tingkat pendidikan akan diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. Hal tersebut mengindikasikan bahwa individu dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan yang lebih beragam dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan menjadi lebih besar. Selain itu, pendidikan juga membantu membentuk pola pikir yang lebih adaptif dan inovatif, yang memungkinkan seseorang untuk menciptakan peluang kerja secara mandiri. Sejalan dengan teori human capital, peningkatan pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja sekaligus pendapatan individu. Setiap tambahan satu tahun masa sekolah diyakini dapat memperkuat kompetensi kerja dan meningkatkan potensi penghasilan, sehingga secara tidak langsung turut berkontribusi dalam menekan angka pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Elfida et al., 2023).

4.6.3 Pengaruh Upah Minimum Provinsi dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, nilai F-statistik pada *Fixed Effect Model* tercatat sebesar 45,9149 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,000, yang lebih kecil dari batas signifikansi $\alpha = 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian, hasil estimasi model

menegaskan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi (X1) dan Rata-Rata Lama Sekolah (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Aceh selama periode 2020-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi tingkat pengangguran terbuka tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor secara terpisah, melainkan merupakan hasil interaksi antara kebijakan pengupahan daerah dan tingkat pencapaian pendidikan tenaga kerja.

Temuan tersebut sejalan dengan sejumlah penelitian data panel yang menunjukkan adanya pengaruh simultan yang signifikan antara tingkat pendidikan, upah minimum, dan pengangguran. Dalam berbagai kajian empiris, variabel pendidikan dan upah minimum terbukti secara bersamaan memengaruhi fluktuasi tingkat pengangguran, meskipun besaran dan arah pengaruh parsialnya dapat berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah yang diteliti. Sebagai contoh, penelitian di kawasan Sarbagita menemukan bahwa tingkat pendidikan dan upah minimum secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran dalam analisis regresi data panel, meskipun dampak individual masing-masing variabel dipengaruhi oleh konteks regional tertentu (Cahyani & Marhaeni, 2022).

Hasil ini mencerminkan bahwa dinamika pasar tenaga kerja di Provinsi Aceh dipengaruhi secara kuat oleh keterkaitan antara faktor ekonomi dan sosial, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan upah dan capaian pendidikan masyarakat. Perubahan pada salah satu

variabel, apabila terjadi bersamaan dengan perubahan pada variabel lainnya, berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan terhadap besaran tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu, keberadaan kedua variabel tersebut dalam model analisis memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam menjelaskan variasi Tingkat Pengangguran Terbuka. Implikasi dari temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang relevan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan serta strategi pengembangan sumber daya manusia yang lebih terarah dan berkelanjutan di Provinsi Aceh. Selain itu, berbagai penelitian empiris di sejumlah provinsi di Indonesia juga menegaskan pentingnya memasukkan aspek pendidikan dan upah dalam perumusan kebijakan yang efektif untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, mengingat kedua faktor tersebut secara simultan memengaruhi peluang partisipasi angkatan kerja baik di sektor formal maupun informal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berlandaskan hasil analisis dan pengkajian data perihal pengaruh Upah Minimum Provinsi serta Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh menggunakan regresi data panel melalui metode *Fixed Effect Model* (FEM), beberapa konklusi dapat dirumuskan menjadi:

1. Variabel Upah Minimum Provinsi (X_1) menunjukkan hubungan positif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Aceh.
2. Variabel Rata-Rata Lama Sekolah (X_2) menunjukkan hubungan negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Aceh.
3. Secara simultan, variabel Upah Minimum Provinsi (X_1) dan Rata-Rata Lama Sekolah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan hasil analisis serta simpulan yang telah dirumuskan, terdapat sejumlah rekomendasi saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Aceh disarankan agar lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan Upah Minimum Provinsi dengan tetap mempertimbangkan kondisi dunia usaha dan kemampuan perusahaan, sehingga kenaikan upah tidak justru menekan penyerapan tenaga kerja, meskipun hasil penelitian menunjukkan pengaruhnya belum signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.
2. Mengingat Rata-Rata Lama Sekolah terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui pemerataan fasilitas pendidikan, pemberian beasiswa, serta penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan agar lulusan lebih siap memasuki pasar kerja.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi awal. Direkomendasikan untuk memasukkan variabel tambahan seperti pertumbuhan ekonomi, partisipasi angkatan kerja, inflasi, tingkat investasi, serta indikator lain yang berpotensi memengaruhi perubahan tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, memperluas rentang waktu penelitian juga diharapkan dapat menghasilkan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, A. N., Mukhtar, S., & Suparno. (2023). Pengaruh rata-rata lama sekolah, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Banten tahun 2013-2022. *Jurnal Internasional Ekonomi & Usaha Bisnis Terkini*, 1(3), 411–420.
- Apriliana, S., & Setyawijaya, R. (2024). *Pengaruh Pertumbuhan Penduduk , Kemiskinan , Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Propinsi Banten The Influence Of Population Growth , Poverty , Education Level And Provincial Minimum Wage On The Level Of Open Unemployment K In Banten Province*. 24(1), 65–79.
- Asraf, M. F., Ernawati, E., Miksalmina, M., & Sapha, A. H. D. (2023). Pengaruh inflasi dan upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 8(3), 189–198.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Ketenagakerjaan Indonesia 2016*. Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. (2024a). *Rata-Rata Lama Sekolah Aceh*. Badan Pusat Statistik Aceh.
- Badan Pusat Statistik. (2024b). *Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh*. Badan Pusat Statistik Aceh.
- Badan Pusat Statistik. (2024c). *Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia*. Badan Pusat Statistik RI.
- Baihawafi, M., & Sebayang, F. A. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Terbuka. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 39–44. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIEB/article/view/1911>

- Cahyani, N. L. P. A., & Marhaeni, A. A. I. N. (2022). Pengaruh tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di kawasan Sarbagita: Analisis data panel. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(2), 356–370.
- Dea Erlangga, C. (2020). Analisis Faktor-Faktor Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253. [http://eprints.unm.ac.id/14350/1/jurnal susi husila.pdf](http://eprints.unm.ac.id/14350/1/jurnal%20susi%20hasil.pdf)
- Desembriarto, D. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul*. 21(4), 4064–4074.
- Disnakermobduk Aceh. (2024). *Upah Minimum Provinsi Aceh*.
- Dornbusch, R., & Fischer, S. (2001). *Makro Ekonomi*. Erlangga.
- Elfida, C., Maimun, & Amalia, N. (2023). *PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI ACEH*. 2(2), 72–84.
- Erlangga, A., Falevi, M. R., Putri, P., & Kurniawan, M. (2024). Pengaruh upah minimum dan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia 2014–2023. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 1(2), 161–177. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i2.191>
- Ernawaningtyas, L. (2021). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan UMP Terhadap Pengangguran di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2011-2019. *Tesis Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Gilarso. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Kanisius.
- Hasyim, A. I. (2016). *Ekonomi Makro*. Prenadamedia Group.

- Hidayah, W., Militina, T., & Ulfah, Y. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja dan Produk Domestik Regional Bruto di Kota Samarinda. *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, 12(1), 138–161. <http://journal.feb.unmul.ac.id>
- Jannah, M., & Sari, I. F. (2023). Analisis Pengaruh Rata- Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 164–172. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2108>
- Johar, M. R., Suharno, & Istiqomah. (2023). Hubungan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka: Mediasi laju pertumbuhan ekonomi. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 7(1), 108–117.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Macroeconomics*. Cengage Learning.
- Mustakim, A., Ferlin, & Rizal. (2022). Pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Kendari tahun 2010-2021. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 209–216.
- Nanga, N. (2001). *Analisis Tenaga Kerja dan Pengangguran*. Rineka Cipta.
- Prawira, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan terhadap pengangguran terbuka di Indonesia. *EcoGen*, 1(1), 162–166.
- Pujoalwanto, B. (2014). *Perekonomian Indonesia*. Graha Ilmu.
- Putra, R., Sukiyono, K., & Purmini. (2021). Economic Growth , Inflation , and Regional Minimum Wage : An Empirical Investigation of the Open Unemployment Rate in Sumatera , Indonesia. *Journal of Agri Socio Economics and Business (JASEB)*, 03(2), 109–122. <https://doi.org/10.31186/jaseb.03.2.109-122>

- Putri, N. A., & Soelistyo, A. (2018). Analisis pengaruh upah, PDRB, dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di kawasan Gerbangkertasusila tahun 2012–2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 357–371.
- Ramadhiani, M., Miksalmina, M., Syathi, P. B., Zulkifli, Z., & Aidar, N. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 57–65.
- Rambe, R. C., Prihanto, P. H., & Hardiani. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 8(1), 54–67.
- Rosaria, S. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Konsumsi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan tengah. *JEPP Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 2(1), 46–57.
- Sahara, W. A., & Iryani, N. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, inflasi dan upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 28–40. <https://ejournal.stiemuhpalopo.ac.id/index.php/jep/issue/view/9>
- Silvie, F. D., & Hasmarini, M. I. (2023). Analisis pengaruh upah minimum kabupaten, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 374–382.
- Simanjuntak, Z., Kamila, T. S., Dwita, Z. P., Haerunisa, D. S., Fathin, S. C., Agustianti, A. I., Maharani, S., Fetya, A., & Desmawan, D. (2025). Analisis Faktor-Faktor Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten. *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(3), 111–120.

Siskawati, N., Surya, R. Z., & Sudeska, E. (2021). PENGARUH HARAPAN LAMA SEKOLAH , RATA – RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP TINGKAT. *Selodang Mayang*, 7(3), 173–177.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sukirno, S. (2018). *Makroekonomi: Teori Pengantar (Edisi ke-3)*. RajaGrafindo Persada.

Sumarsono, S. (2018). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu.

Tahir, K. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Investasi, Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(2), 110–132. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1440550>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Data Upah Minimum Provinsi (UMP), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh

Kabupaten/Kota	Tahun	UMP	RLS	TPT	UMP_ribu
SIMEULUE	2017	2500000	9.06	3.12	2500,0
SIMEULUE	2018	2700000	9.07	4.95	2700,0
SIMEULUE	2019	2916810	9.08	5.82	2916,8
SIMEULUE	2020	3165031	9.34	5.47	3165,0
SIMEULUE	2021	3165031	9.48	5.71	3165,0
SIMEULUE	2022	3166460	9.73	6	3166,5
SIMEULUE	2023	3413666	9.81	5.85	3413,7
SIMEULUE	2024	3460672	9.89	5.50	3460,7
ACEH SINGKIL	2017	2500000	7.84	7.14	2500,0
ACEH SINGKIL	2018	2700000	8.05	7.96	2700,0
ACEH SINGKIL	2019	2916810	8.52	8.58	2916,8
ACEH SINGKIL	2020	3165031	8.53	8.24	3165,0
ACEH SINGKIL	2021	3165031	8.68	8.36	3165,0
ACEH SINGKIL	2022	3166460	8.69	6.88	3166,5
ACEH SINGKIL	2023	3413666	8.7	6.84	3413,7
ACEH SINGKIL	2024	3460672	8.72	6.44	3460,7
ACEH SELATAN	2017	2500000	8.33	7.24	2500,0
ACEH SELATAN	2018	2700000	8.38	6.03	2700,0
ACEH SELATAN	2019	2916810	8.59	6.54	2916,8
ACEH SELATAN	2020	3165031	8.87	6.54	3165,0
ACEH SELATAN	2021	3165031	8.88	6.46	3165,0
ACEH SELATAN	2022	3166460	8.89	4.82	3166,5
ACEH SELATAN	2023	3413666	8.91	4.73	3413,7
ACEH SELATAN	2024	3460672	8.92	4.56	3460,7
ACEH TENGGARA	2017	2500000	9.63	4.75	2500,0

ACEH TENGGARA	2018	2700000	9.64	3.75	2700,0
ACEH TENGGARA	2019	2916810	9.65	3.45	2916,8
ACEH TENGGARA	2020	3165031	9.66	5.72	3165,0
ACEH TENGGARA	2021	3165031	9.67	6.43	3165,0
ACEH TENGGARA	2022	3166460	9.92	5.09	3166,5
ACEH TENGGARA	2023	3413666	10.09	5	3413,7
ACEH TENGGARA	2024	3460672	10.10	4.79	3460,7
ACEH TIMUR	2017	2500000	7.80	8.42	2500,0
ACEH TIMUR	2018	2700000	7.85	6.92	2700,0
ACEH TIMUR	2019	2916810	7.86	7.61	2916,8
ACEH TIMUR	2020	3165031	8.15	7.26	3165,0
ACEH TIMUR	2021	3165031	8.21	7.13	3165,0
ACEH TIMUR	2022	3166460	8.32	8.07	3166,5
ACEH TIMUR	2023	3413666	8.47	8.03	3413,7
ACEH TIMUR	2024	3460672	8.48	7.75	3460,7
ACEH TENGAH	2017	2500000	9.67	3.91	2500,0
ACEH TENGAH	2018	2700000	9.68	2.11	2700,0
ACEH TENGAH	2019	2916810	9.69	2.65	2916,8
ACEH TENGAH	2020	3165031	9.85	3.05	3165,0
ACEH TENGAH	2021	3165031	9.86	2.61	3165,0
ACEH TENGAH	2022	3166460	9.87	4.44	3166,5
ACEH TENGAH	2023	3413666	9.89	4.42	3413,7
ACEH TENGAH	2024	3460672	10.03	4.21	3460,7
ACEH BARAT	2017	2500000	9.04	6.20	2500,0
ACEH BARAT	2018	2700000	9.08	8.58	2700,0
ACEH BARAT	2019	2916810	9.09	7.41	2916,8
ACEH BARAT	2020	3165031	9.37	7.3	3165,0
ACEH BARAT	2021	3165031	9.55	7.09	3165,0
ACEH BARAT	2022	3166460	9.87	6.09	3166,5
ACEH BARAT	2023	3413666	9.98	6.07	3413,7
ACEH BARAT	2024	3460672	9.99	5.58	3460,7
ACEH BESAR	2017	2500000	9.93	8.49	2500,0
ACEH BESAR	2018	2700000	10.14	7.29	2700,0
ACEH BESAR	2019	2916810	10.31	7.67	2916,8

ACEH BESAR	2020	3165031	10.32	7.62	3165,0
ACEH BESAR	2021	3165031	10.33	7.7	3165,0
ACEH BESAR	2022	3166460	10.35	8.28	3166,5
ACEH BESAR	2023	3413666	10.36	8.17	3413,7
ACEH BESAR	2024	3460672	10.37	7.93	3460,7
PIDIE	2017	2500000	8.76	7.64	2500,0
PIDIE	2018	2700000	8.81	7.24	2700,0
PIDIE	2019	2916810	8.82	6.83	2916,8
PIDIE	2020	3165031	8.99	6.45	3165,0
PIDIE	2021	3165031	9	7.28	3165,0
PIDIE	2022	3166460	9.02	5.94	3166,5
PIDIE	2023	3413666	9.03	5.92	3413,7
PIDIE	2024	3460672	9.04	5.74	3460,7
BIREUEN	2017	2500000	9.16	4.50	2500,0
BIREUEN	2018	2700000	9.17	3.52	2700,0
BIREUEN	2019	2916810	9.27	3.83	2916,8
BIREUEN	2020	3165031	9.28	4.12	3165,0
BIREUEN	2021	3165031	9.29	4.32	3165,0
BIREUEN	2022	3166460	9.31	4.2	3166,5
BIREUEN	2023	3413666	9.32	4.14	3413,7
BIREUEN	2024	3460672	9.59	3.93	3460,7
ACEH UTARA	2017	2500000	8.10	11.02	2500,0
ACEH UTARA	2018	2700000	8.11	10.14	2700,0
ACEH UTARA	2019	2916810	8.46	8.65	2916,8
ACEH UTARA	2020	3165031	8.63	8.56	3165,0
ACEH UTARA	2021	3165031	8.64	8.31	3165,0
ACEH UTARA	2022	3166460	8.73	7.08	3166,5
ACEH UTARA	2023	3413666	8.85	7.07	3413,7
ACEH UTARA	2024	3460672	9.11	6.88	3460,7
ACEH BARAT DAYA	2017	2500000	8.12	3.16	2500,0
ACEH BARAT DAYA	2018	2700000	8.13	3.93	2700,0
ACEH BARAT DAYA	2019	2916810	8.35	4.29	2916,8
ACEH BARAT DAYA	2020	3165031	8.66	3.93	3165,0
ACEH BARAT DAYA	2021	3165031	8.67	4.04	3165,0

ACEH BARAT DAYA	2022	3166460	8.68	4.12	3166,5
ACEH BARAT DAYA	2023	3413666	8.77	4.08	3413,7
ACEH BARAT DAYA	2024	3460672	8.78	3.83	3460,7
GAYO LUES	2017	2500000	7.39	1.71	2500,0
GAYO LUES	2018	2700000	7.69	2.49	2700,0
GAYO LUES	2019	2916810	7.91	1.74	2916,8
GAYO LUES	2020	3165031	8.2	2.01	3165,0
GAYO LUES	2021	3165031	8.4	1.84	3165,0
GAYO LUES	2022	3166460	8.41	2.7	3166,5
GAYO LUES	2023	3413666	8.42	2.65	3413,7
GAYO LUES	2024	3460672	8.44	2.40	3460,7
ACEH TAMIANG	2017	2500000	8.47	5.43	2500,0
ACEH TAMIANG	2018	2700000	8.70	6.21	2700,0
ACEH TAMIANG	2019	2916810	8.89	6.04	2916,8
ACEH TAMIANG	2020	3201143	8.9	7.97	3201,1
ACEH TAMIANG	2021	3211143	8.91	5.87	3211,1
ACEH TAMIANG	2022	3456603	9.04	7.38	3456,6
ACEH TAMIANG	2023	3456603	9.24	7.21	3456,6
ACEH TAMIANG	2024	3491031	9.30	6.95	3491,0
NAGAN RAYA	2017	2500000	8.25	4.11	2500,0
NAGAN RAYA	2018	2700000	8.26	5.91	2700,0
NAGAN RAYA	2019	2916810	8.50	5.35	2916,8
NAGAN RAYA	2020	3165031	8.68	5.11	3165,0
NAGAN RAYA	2021	3165031	8.69	4.99	3165,0
NAGAN RAYA	2022	3166460	8.95	5.84	3166,5
NAGAN RAYA	2023	3413666	8.96	5.74	3413,7
NAGAN RAYA	2024	3460672	9.25	5.22	3460,7
ACEH JAYA	2017	2500000	8.13	6.23	2500,0
ACEH JAYA	2018	2700000	8.37	4.91	2700,0
ACEH JAYA	2019	2916810	8.66	4.18	2916,8
ACEH JAYA	2020	3165031	8.7	4.08	3165,0
ACEH JAYA	2021	3165031	8.71	3.47	3165,0
ACEH JAYA	2022	3166460	8.72	3.12	3166,5
ACEH JAYA	2023	3413666	8.74	2.88	3413,7

ACEH JAYA	2024	3460672	9.02	2.75	3460,7
BENER MERIAH	2017	2500000	9.55	1.06	2500,0
BENER MERIAH	2018	2700000	9.56	1.06	2700,0
BENER MERIAH	2019	2916810	9.78	1.03	2916,8
BENER MERIAH	2020	3165031	9.79	1.35	3165,0
BENER MERIAH	2021	3165031	10	1.24	3165,0
BENER MERIAH	2022	3166460	10.01	2.61	3166,5
BENER MERIAH	2023	3413666	10.12	2.45	3413,7
BENER MERIAH	2024	3460672	10.13	2.20	3460,7
PIDIE JAYA	2017	2500000	8.84	4.89	2500,0
PIDIE JAYA	2018	2700000	8.86	5.02	2700,0
PIDIE JAYA	2019	2916810	9.04	4.34	2916,8
PIDIE JAYA	2020	3165031	9.33	6.58	3165,0
PIDIE JAYA	2021	3165031	9.34	3.57	3165,0
PIDIE JAYA	2022	3166460	9.53	4.4	3166,5
PIDIE JAYA	2023	3413666	9.58	4.34	3413,7
PIDIE JAYA	2024	3460672	9.59	3.82	3460,7
BANDA ACEH	2017	2500000	12.59	7.75	2500,0
BANDA ACEH	2018	2948020	12.60	7.24	2948,0
BANDA ACEH	2019	3000970	12.64	6.89	3001,0
BANDA ACEH	2020	3201143	12.65	9.54	3201,1
BANDA ACEH	2021	3280327	12.83	8.94	3280,3
BANDA ACEH	2022	3540555	13.03	8.62	3540,6
BANDA ACEH	2023	3540555	13.04	8.03	3540,6
BANDA ACEH	2024	3660898	13.10	7.55	3660,9
SABANG	2017	2500000	10.70	3.00	2500,0
SABANG	2018	2700000	10.97	4.19	2700,0
SABANG	2019	2916810	11.13	4.60	2916,8
SABANG	2020	3165031	11.14	4.81	3165,0
SABANG	2021	3165031	11.18	3.56	3165,0
SABANG	2022	3166460	11.19	4.01	3166,5
SABANG	2023	3413666	11.2	3.92	3413,7
SABANG	2024	3460672	11.22	2.95	3460,7
LANGSA	2017	2500000	10.90	7.03	2500,0

LANGSA	2018	2700000	11.06	7.12	2700,0
LANGSA	2019	2916810	11.10	7.69	2916,8
LANGSA	2020	3165031	11.11	9.75	3165,0
LANGSA	2021	3165031	11.12	7.21	3165,0
LANGSA	2022	3166460	11.14	7.85	3166,5
LANGSA	2023	3413666	11.27	7.73	3413,7
LANGSA	2024	3460672	11.28	7.34	3460,7
LHOKSEUMAWE	2017	2500000	10.88	10.51	2500,0
LHOKSEUMAWE	2018	2700000	10.89	12.51	2700,0
LHOKSEUMAWE	2019	2916810	10.90	11.01	2916,8
LHOKSEUMAWE	2020	3165031	10.91	11.99	3165,0
LHOKSEUMAWE	2021	3165031	11.11	11.16	3165,0
LHOKSEUMAWE	2022	3166460	11.12	9.15	3166,5
LHOKSEUMAWE	2023	3413666	11.27	8.78	3413,7
LHOKSEUMAWE	2024	3460672	11.31	8.47	3460,7
SUBULUSSALAM	2017	2500000	7.12	4.91	2500,0
SUBULUSSALAM	2018	2700000	7.39	6.44	2700,0
SUBULUSSALAM	2019	2916810	7.58	7.25	2916,8
SUBULUSSALAM	2020	3165031	7.84	6.93	3165,0
SUBULUSSALAM	2021	3165031	8.03	6.26	3165,0
SUBULUSSALAM	2022	3166460	8.22	5.75	3166,5
SUBULUSSALAM	2023	3413666	8.32	5.69	3413,7
SUBULUSSALAM	2024	3460672	8.43	5.12	3460,7

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

Lampiran 2.

Anlisis Statistik Deskriptif

	TPT	UMP	RLS
Mean	5.778315	3069820.	9.430380
Median	5.845000	3165031.	9.085000
Maximum	12.51000	3660898.	13.10000
Minimum	1.030000	2500000.	7.120000
Std. Dev.	2.278849	319213.6	1.200326
Skewness	0.169583	-0.448773	0.979733
Kurtosis	2.836874	2.083319	3.830523
Jarque-Bera	1.085936	12.61850	34.72446
Probability	0.581021	0.001819	0.000000
Sum	1063.210	5.65E+08	1735.190
Sum Sq. Dev.	950.3472	1.86E+13	263.6633
Observations	184	184	184

Lampiran 3.

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	46.811838	(22,159)	0.0000
Cross-section Chi-square	370.179721	22	0.0000

Lampiran 4.

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.092776	2	0.0475

Lampiran 5.

Estimasi Data Panel Metode *Fixed Effect Model* (FEM)

Dependent Variable: TPT				
Method: Panel Least Squares				
Date: 02/07/26 Time: 03:15				
Sample: 2017 2024				
Periods included: 8				
Cross-sections included: 23				
Total panel (balanced) observations: 184				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.859877	6.041389	0.638905	0.5238
LOG(UMP_RIBU)	1.426730	1.190390	1.198540	0.2325
RLS	-1.010491	0.487902	-2.071094	0.0400
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.873905	Mean dependent var	5.778315	
Adjusted R-squared	0.854872	S.D. dependent var	2.278849	
S.E. of regression	0.868142	Akaike info criterion	2.680784	
Sum squared resid	119.8336	Schwarz criterion	3.117596	
Log likelihood	-221.6322	Hannan-Quinn criter.	2.857830	
F-statistic	45.91495	Durbin-Watson stat	1.229649	
Prob(F-statistic)	0.000000			